

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT



**BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN
BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban merujuk pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang disampaikan ke MenKeu, Kepala

Bappenas dan MenPANRB, Laporan Kinerja dihasilkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

LAKIN BPSIP Kalimantan Barat ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi pemerintah terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Pontianak, Desember 2023
Kepala Balai,




Anjar Suprpto, S.T.P., M.P.
NIP. 19720912 200501 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian.

BPSIP Kalimantan Barat dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Institusi ini mempunyai visi menjadi pusat unggulan dalam penerapan standar instrumen pertanian di Kalimantan Barat, yang mendorong pertumbuhan dan inovasi sektor pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan. Sedangkan, misinya adalah mengembangkan dan menerapkan standar instrumen pertanian yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan lokal, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi kepada para petani, agar dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi tantangan pertanian modern, membangun kelembagaan yang kuat untuk mendukung penerapan standar bidang pertanian, sehingga hasilnya dapat segera diimplementasikan di lapangan, melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, memberikan dukungan teknis kepada pelaku pertanian dalam mengadopsi dan memahami standar yang telah ditetapkan, mengembangkan jejaring kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional, guna mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian, dan menjadi agen perubahan yang berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kawasan pertanian industrial yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) memiliki fungsi yaitu: (1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; (7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen

pertanian tepat guna spesifik lokasi; (9) Pelaksanaan urusan tata usaha BPSIP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Barat masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan yang ada seperti terbatasnya sumberdaya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, dan terbatasnya sumber dana. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja BPSIP Kalimantan Barat dalam menjalankan tupoksinya, dilakukan kerjasama dengan Pemda Kalimantan Barat, Perguruan Tinggi, Balai Pengujian Standar/Pusat Standardisasi, dan Swasta. Guna mendukung program daerah Provinsi Kalimantan Barat di bidang pertanian beberapa instansi di lingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Barat yang telah bekerjasama dengan BPSIP Kalimantan Barat adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Ketahanan Pangan, dan instansi terkait lainnya.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya maka program penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dilakukan BPSIP harus mendukung Program Pembangunan Pertanian Nasional maupun Daerah. BPSIP Kalimantan Barat pada tahun 2023 melaksanakan Kegiatan utama yaitu:

1. Tersedianya hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan
2. Tersedianya lembaga penerap standar yang didampingi
3. Tersedianya model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan
4. Tersedianya produk instrumen tanaman pangan terstandar
5. Terlaksananya layanan BMN
6. Terlaksananya layanan umum
7. Terlaksananya layanan perkantoran
8. Terlaksananya layanan manajemen SDM
9. Terlaksananya layanan perencanaan dan penganggaran
10. Terlaksananya layanan pemantauan dan evaluasi
11. Terlaksananya layanan manajemen keuangan

Total dana yang diterima dari APBN oleh BPSIP Kalimantan Barat dalam DIPA 2023 sebesar Rp. 10.678.760.000. Secara keseluruhan realisasi anggaran berdasarkan SP2D realisasi anggaran sebesar Rp. 10.434.585.679 atau sekitar 97,71% dari total anggaran, dimana terdapat anggaran yang tidak terealisasi karena blokir anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat).

Dalam upaya meningkatkan kinerja BPSIP Kalimantan Barat, maka masalah yang ada harus segera diatasi antara lain dengan menjalin kesepakatan antara BPSIP Kalimantan Barat dengan BPKP dan Itjentan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Visi, Misi, Tugas, Fungsi dan Organisasi	3
1.3 Tujuan dan Sasaran	10
II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis 2022-2024.....	11
2.2 Sasaran dan Target Kinerja BPSIP Kalimantan Barat.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Akuntabilitas Kinerja	18
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	19
3.3 Analisis Capaian Kegiatan.....	20
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	54
IV. PENUTUP	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program BSIP	4
Tabel 2. Keterkaitan sasaran program dan indikator kinerja program BPSIP Kalimantan Barat	5
Tabel 3. Standar Kinerja BPSIP Kalimantan Barat.....	14
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2023.....	15
Tabel 5. Rincian Kegiatan Tahun 2023.....	16
Tabel 6. Pengukuran Kinerja BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2023	19
Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 1.....	20
Tabel 8. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	21
Tabel 9. Penyebaran Materi Penyuluhan (Leaflet dan Brosur) melalui Bimbingan Teknis.....	30
Tabel 10. Penyebaran Materi Penyuluhan (Leaflet dan Brosur) melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	30
Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 2.....	43
Tabel 12. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	43
Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 3.....	49
Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 4.....	50
Tabel 15. Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja 2023	56
Tabel 16. Tabel Realisasi Keuangan Pada Rincian Output 2023 (berdasarkan Realisasi SPM)	57
Tabel 17. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hierarki LAKIP berdasarkan Perpres No. 29/2014 tentang SAKIP	2
Gambar 2. Struktur Organisasi lingkup BSIP	3
Gambar 3. Struktur Organisasi BPSIP Kalimantan Barat	7
Gambar 4. Komposisi SDM Fungsional BPSIP Kalbar (Desember 2023)	8
Gambar 5. Sebaran SDM BPSIP Kalbar berdasarkan Pendidikan (Desember 2023)	9
Gambar 6. Koordinasi kegiatan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas (kiri) dan penangkar benih jeruk (kanan) sebagai para pemangku kepentingan standar.....	23
Gambar 7. Pelaksanaan FGD identifikasi standar jeruk siam yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas (kiri) dan identifikasi standar lidah buaya di Kota Pontianak (kanan).	23
Gambar 8. Poster tujuh SNI wajib dibidang pertanian.....	25
Gambar 9. Brosur Sistem Pertanian Organik (SNI : 6729-2016), Leaflet tandar mutu nenas (SNI : 3166-2009), dan Folder GAP Bujangseta Jeruk	25
Gambar 10. Stand Pameran Produk Pertanian Pada Kegiatan Gebyar Agrostadar	26
Gambar 11. Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Dalam Bentuk Media Cetak	26
Gambar 12. Bimbingan Teknis GAP BUJANGSETA	26
Gambar 13. Pertanaman Budidaya Sayuran di Lahan Pekarangan BPSIP Kalimantan Barat	28
Gambar 14. Pertanaman Budidaya Sayuran dalam Polybag/Rak/Pot kegiatan Taman Agrostandar	28
Gambar 15. Budidaya Sayuran Hidroponik Kegiatan Taman Agrostandar	28
Gambar 16. Bimtek Hidroponik Kegiatan Taman Agrostandar BPSIP Kalimantan Barat	29
Gambar 17. Layanan Kunjungan dan Konsultasi Budidaya Sayuran Kegiatan Taman Agrostandar.....	29
Gambar 18. Kegiatan Pendampingan Teknologi Taman Agrostandar	29
Gambar 19. Penyerahan Benih semaian Polybag sayuran kegiatan Taman Agrostandar.....	29
Gambar 20. Penyebaran Materi.....	31
Gambar 21. Bimtek Standar Mutu Nenas (SNI 3166:2009) di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah.....	33

Gambar 22. Pendampingan penerapan budidaya nanas sesuai SNI: 6729:2016.....	34
Gambar 23. Sertifikat Organik dari ICERT kepada Poktan Harapan Baru	34
Gambar 24. Label produk buah segar nanas organik madu galang.....	34
Gambar 25. Promosi nanas organik Madu Galang melalui kegiatan pameran	35
Gambar 26. Bimtek SNI 6729:2016 tentang sistem pertanian organik, dan SNI 7763:2018 tentang pupuk organik padat di Desa Bakau Besar Darat	35
Gambar 27. Rapat persiapan dan sosialisasi dokumen mutu laboratorium	36
Gambar 28. Uji Fungsi Madgetech Pressure, Humidity, Temperature Data Logger	36
Gambar 29. Proses Kalibrasi In situ Peralatan Laboratorium	37
Gambar 30. Training verifikasi fungsi alat dan metode pengujian menggunakan Vapodest oleh PT. Abadi Nusa Usaha Semesta	37
Gambar 31. Penentuan CPCL Program ICARE	38
Gambar 32. Peta foto udara petak CPCL	39
Gambar 33. Survei penilaian kinerja rantai nilai eksisting komoditas jeruk dan padi.....	40
Gambar 34. Model agribisnis tingkat kawasan komoditas jeruk dan padi berbasis korporasi petani	40
Gambar 35. Pembentukan dan fasilitasi anggota korporasi petani.....	41
Gambar 36. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi petani dan pengusaha tani muda dalam poktan/gapoktan dan korporasi petani	41
Gambar 37. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah	42
Gambar 38. Roguing pada fase generatif awal dan performa varietas Inpari 49 Jembar menjelang panen	44
Gambar 39. Benih di gudang UPBS BPSIP Kalimantan Barat dan penyerahan benih kepada ketua Poktan Karya Tani Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.....	45
Gambar 40. Pelaksanaan bimbingan teknis di (1) Kabupaten Melawi, (2) Kabupaten Sintang, (3) Kabupaten Sanggau, (4) Kota Pontianak	46
Gambar 41. Perbenihan dan pembibitan di lapangan.....	48
Gambar 42. Sertifikasi benih dan pemasangan label	48
Gambar 43. Grafik Capaian Nilai Kinerja Anggaran	50
Gambar 44. Pagu Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja.....	54
Gambar 45. Komposisi Pagu Anggaran BPSIP Kalbar 2023	54

Gambar 46. Alokasi Anggaran Pada Rincian Output Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas	55
Gambar 47. Alokasi Anggaran Rincian Output Dukungan Manajemen 2023	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pencapaian kinerja tahun berjalan (Form 1).....	69
Lampiran 2	Pencapaian perjanjian kinerja 5 tahun terakhir (Form 2)	70
Lampiran 3	Pencapaian perjanjian kinerja dibandingkan . target renstra (Form 3)	71
Lampiran 4	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Form 4)	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188) Tentang Kementerian Pertanian, mengalami perubahan pada susunan organisasi (pasal 6) yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri atas:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan;
3. Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
4. Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan; dan
5. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sebagai organisasi yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah BSIP, Kementerian Pertanian, BPSIP Kalimantan Barat memiliki tugas untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Sebagai lembaga pemerintah, BPSIP Kalimantan Barat berusaha untuk mewujudkan suatu lembaga pemerintahan yang transparan dan kredibel, salah satunya dengan memberikan LAKIN (Laporan Kinerja). Payung hukum pelaksanaannya yaitu :

- UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Merujuk pada peraturan di atasnya tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang disampaikan ke MenKeu, Kepala Bappenas dan MenPANRB. Laporan Kinerja dihasilkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Diatur

lebih lanjut Peraturan Presiden diusulkan oleh MenKeu setelah berkoordinasi dengan kepala Bapenas, MenPANRB dan Mendagri.



Gambar 1. Hierarki LAKIP berdasarkan Perpres No. 29/2014 tentang SAKIP

Gambar 1 menjelaskan bahwa dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri PANRB. Kementerian PANRB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

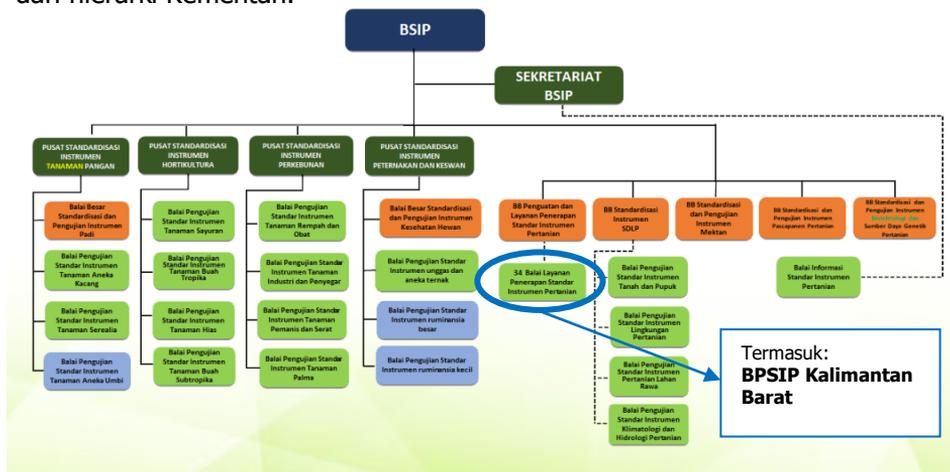
Kementerian PANRB mengeluarkan Permen PANRB No. 12 Tahun 2015 yaitu Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan dengan LAKIN ini dapat menggambarkan Kinerja BPSIP Kalimantan Barat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan mengenai sasaran dan tujuan instansi BPSIP Kalimantan Barat sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban dari unit kerja mandiri yang berada di bawah Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan DIPA Tahun 2023. Dengan demikian tujuan penyusunan LAKIN BPSIP Kalbar ini adalah:

1. Menilai Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumberdaya
4. Memberikan Informasi Kinerja Organisasi.

1.2 Visi, Misi, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Pertanian RI, BPSIP Kalimantan Barat merupakan perpanjangan tangan Kementan di daerah, sehingga visi, misi, fungsi dan keorganisasiannya pun tak terlepas dari hierarki Kementan.



Gambar 2. Struktur Organisasi lingkup BSIP

Gambar 2 menjelaskan tentang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berdasarkan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 merupakan salah satu unit eselon satu dibawah Kementerian Pertanian yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Pusat. Sedangkan, berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 dalam mendukung fungsi organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) lingkup BSIP terdiri atas 7 Balai Besar, 49 Balai, dan 3 Loka. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian merupakan eselon dua yang mempunyai kewajiban untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang tersebar di 34 BPSIP, salah satunya BPSIP Kalimantan Barat. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program disajikan pada **Tabel 1**, sedangkan keterkaitan

sasaran program dan indikator kinerja program BSIP Tahun 2023 disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program BSIP

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM
Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.	1. Meningkatkan standar mutu proses dan pertanian berkelanjutan serta berdaya saing	1. Menyediakan instrument pertanian mendukung berkelanjutan dan berdaya saing (Persentase penerapan standar instrumen pertanian)	1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
	2. Meningkatkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar	2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas (Persentase pemanfaatan produk terstandar)	2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
	3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas	4. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP Pangan berkualitas (Nilai PMRB Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian)	3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
			4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sumber: Renstra BSIP 2022-2024

Tabel 1 menjelaskan tentang visi tersebut merupakan sasaran umum kebijakan BSIP mendukung visi Kementerian Pertanian, sedangkan tiga misi BSIP tersebut merupakan strategi utama untuk mewujudkan visi BSIP. Dalam 2 (dua) tahun kedepan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 atas arah dan kebijakan strategi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Tabel 2. Keterkaitan sasaran program dan indikator kinerja program BPSIP Kalimantan Barat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) 2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)
2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat, 2023

Tabel 2 menjelaskan tentang sebagai instansi vertikal dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan di bawah koordinasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, BPSIP Kalimantan Barat juga mempunyai indikator kinerja program yang sesuai dengan sasaran program yang dikehendaki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Disamping itu, visi BPSIP Kalimantan Barat tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimana BPSIP Kalimantan Barat berada, karena BPSIP Kalimantan Barat menjadi ujung tombak BSIP dalam menumbuhkan diseminasi standardisasi instrument pertanian spesifik lokasi di daerah.

Secara singkat visi BPSIP Kalimantan Barat adalah:

"Menjadi pusat unggulan dalam penerapan standar instrumen pertanian di Kalimantan Barat, yang mendorong pertumbuhan dan inovasi sektor pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan"

Sedangkan, BPSIP Kalimantan Barat menterjemahkan visi tersebut di atas menjadi misi, yang harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang didasari oleh visi tentang inovasi teknologi spesifik lokasi, kebutuhan pengguna, diseminasi teknologi pertanian, tantangan dan peluang. Misi dari BPSIP Kalimantan Barat adalah:

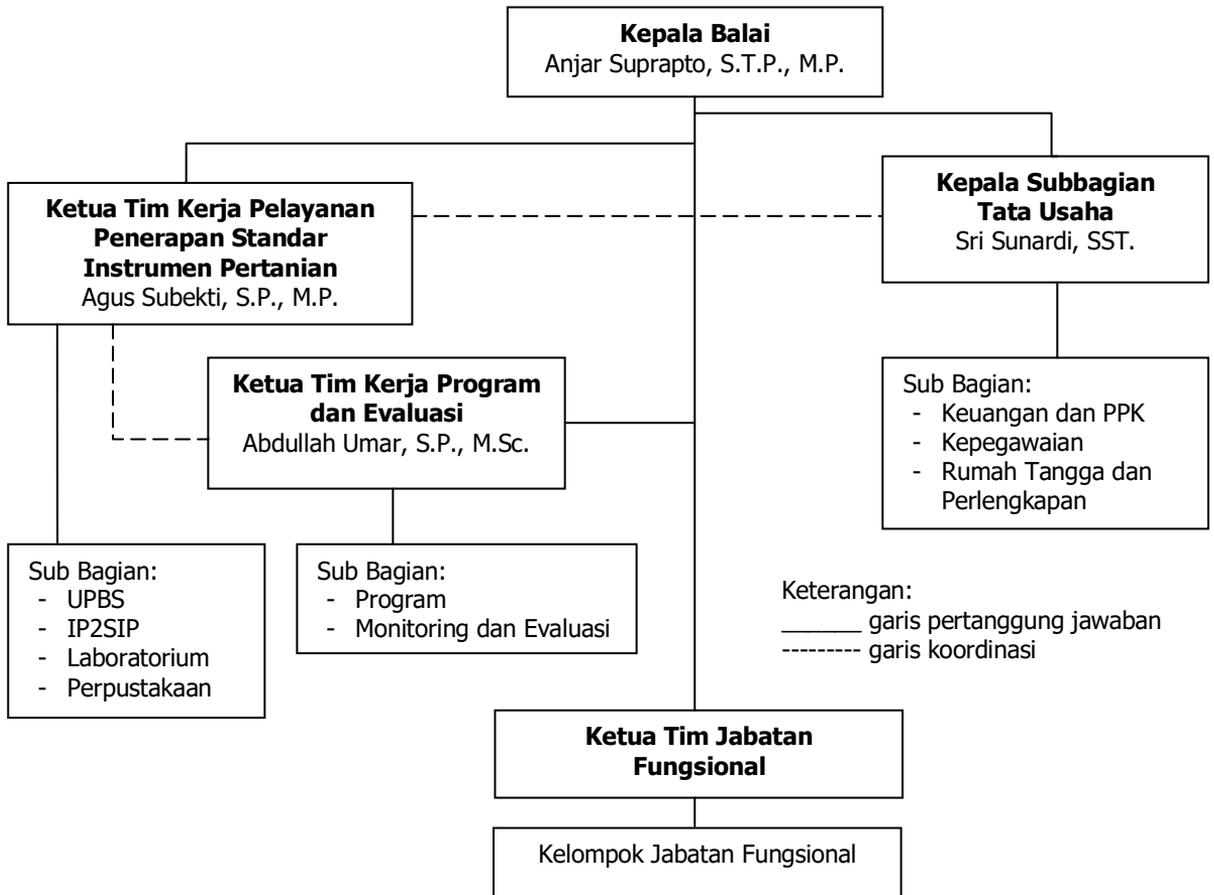
1. Mengembangkan dan menerapkan standar instrumen pertanian yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan lokal, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi kepada para petani, agar dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi tantangan pertanian modern.

3. Membangun kelembagaan yang kuat untuk mendukung penerapan standar bidang pertanian, sehingga hasilnya dapat segera diimplementasikan di lapangan.
4. Melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, memberikan dukungan teknis kepada pelaku pertanian dalam mengadopsi dan memahami standar yang telah ditetapkan.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional, guna mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian.
6. Menjadi agen perubahan yang berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kawasan pertanian industrial yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSIP Kalimantan Barat adalah unit pelaksana teknis di bidang diseminasi standar instrumen pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Dalam kesehariannya BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sedangkan Fungsi BPSIP adalah (1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (3) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (4) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (5) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (6) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; (7) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian tepat guna spesifik lokasi; (9) Pelaksanaan urusan tata usaha BPSIP.

Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Pelayanan Penerapan Standar Instrumen Pertanian, dan Ketua Tim Program dan Evaluasi. Sedangkan, secara fungsional dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari jabatan Fungsional Penyuluh dan Fungsional Khusus lainnya.

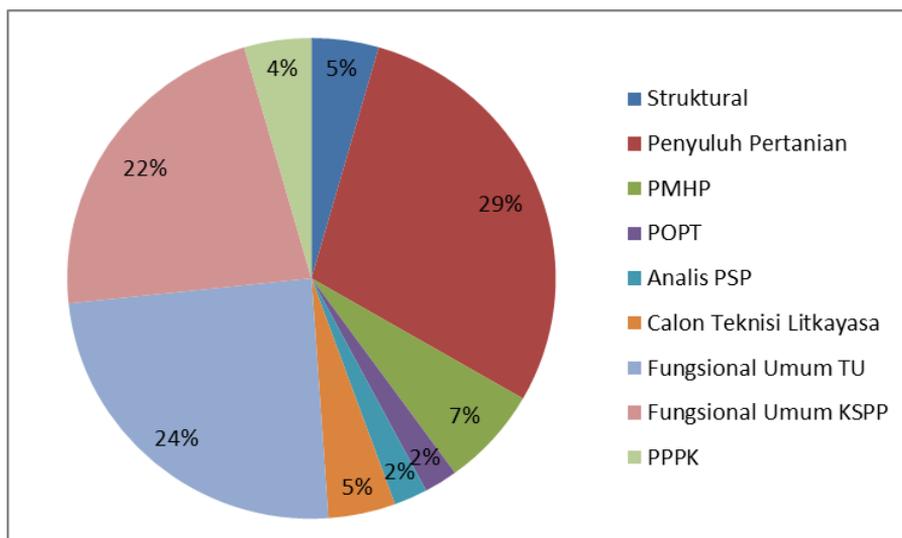


Gambar 3. Struktur Organisasi BPSIP Kalimantan Barat

Gambar 3 terlihat bahwa dalam tugasnya, Kepala Balai dibantu Tim Kerja Program dan Evaluasi dalam persiapan, penyusunan dan perumusan program diseminasi standardisasi instrumen pertanian. Dalam tugasnya, Tim Kerja Program dan Evaluasi bekerjasama dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang didukung oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Sub Baggian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha bertugas dalam urusan kepegawaian, administrasi dan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga Balai. Tim Kerja Pelayanan Penerapan Standar Instrumen Pertanian bertugas dalam Penyiapan dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi, Diseminasi Standardisasi Instrumen Pertanian, sarana Laboratorium, dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP).

Kepala IP2SIP secara fungsional bertugas membantu pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian serta bertanggungjawab kepada Kepala Balai. Fungsi IP2SIP atau Kebun Percobaan untuk memproduksi benih sumber, kebun produksi dan juga berfungsi sebagai lokasi untuk diseminasi standar instrumen pertanian dalam bentuk visitor plot, show window, expose maupun sebagai lokasi agro edu wisata.

Ketenagakerjaan pada BPSIP Kalimantan Barat hingga 31 Desember 2023 adalah 67 orang yang terdiri dari 43 orang PNS, 2 orang PPPK dan 22 tenaga kontrak. Komposisi PNS BPSIP yang menduduki jabatan fungsional umum dan tertentu antara lain Fungsional Penyuluh (29%) merupakan jumlah terbanyak komposisi pegawai di BPSIP Kalimantan Barat. Selanjutnya, jabatan Struktural (4%), Fungsional Umum dibawah Tata Usaha (24%), Fungsional Umum dibawah KSPP (22%) Fungsional PMHP (7%), Fungsional POPT (2%), Fungsional Analisis PSP (2%), Calon Teknisi Litkayasa (5%) dan PPPK (4%). Komposisi SDM Fungsional BPSIP Kalimantan Barat disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Komposisi SDM Fungsional BPSIP Kalbar (Desember 2023)

Adapun sebaran SDM BPSIP Kalimantan Barat menurut Pendidikan Tahun 2023 terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sebaran SDM BPSIP Kalbar berdasarkan Pendidikan (Desember 2023)

Pada tahun 2023, dalam melaksanakan mandat dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Barat didukung dengan dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 7.357.062.000,- namun setelah mengalami beberapa kali revisi, revisi terakhir yaitu revisi ke-12 (dua belas) jumlah pagu menjadi Rp. 10.678.760.000. Secara keseluruhan realisasi anggaran berdasarkan SPM sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.436.151.896 atau sekitar 97,73% sedangkan, berdasarkan SP2D realisasi anggaran sebesar Rp. 10.434.585.679 atau sekitar 97,71% dari total anggaran, dimana terdapat anggaran yang tidak terealisasi karena blokir anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat).

Penyusunan LAKIN BPSIP Kalimantan Barat dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2023, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja BPSIP Kalimantan Barat pada tahun mendatang. Pada LAKIN 2023 ini, disajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BPSIP Kalimantan Barat, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang

dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) di BPSIP Kalimantan Barat.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai mandat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian kepada BPSIP Kalimantan Barat untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP pangan berkualitas.

Sasaran:

1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
2. Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis 2022-2024

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dibentuk pada 21 September 2022 berdasarkan reorganisasi Kementerian Pertanian melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Selanjutnya, Permentan Nomor 19 Tahun 2022 dikeluarkan untuk mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar, sedangkan pengaturan SOTK UPT (Balai) lingkup BSIP diatur dalam Permentan 13 Tahun 2023.

Kementerian Pertanian memiliki 3 (tiga) program yang terbagi berdasarkan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN1), peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dan peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di Sektor Riil, dan industrialisasi (PP6), sedangkan, program Kementan sesuai RSPB antara lain program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program dukungan manajemen. Dalam mendukung hal tersebut, peran standardisasi di bidang pertanian merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program Prioritas (PP) yang disasar adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6).

Merespon tantangan di atas, serta memperhatikan dinamika pembangunan di daerah maupun nasional, diperlukan arahan untuk lebih memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi instrumen pertanian, khususnya pada periode tahun 2022–2024. Arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yakni menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk, dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPRO, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll).

Penyesuaian dan penajaman Rencana Strategis BPSIP Kalimantan Barat 2022–2024 yang merupakan perwujudan dari visi, misi, program, dan

kegiatan BPSIP Kalimantan Barat dalam kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi sangat diperlukan sebagai dokumen perencanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Penajaman dan penyesuaian Renstra 2022–2024 ini juga merespon dinamika kebijakan dan prioritas program Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024 Kementerian Pertanian, yaitu pembangunan pertanian yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yaitu:

1. Mendorong penyiapan standar instrumen pertanian melalui sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan pertanian, dan identifikasi kebutuhan standar dan penjaringan umpan balik penerapan standar.
2. Merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standard di bidang pertanian.
3. Mendorong penerapan standar instrumen pertanian melalui pengembangan model pendampingan, penyusunan model penerapan dan pendampingan standar instrumen pertanian, dan pengembangan spectrum diseminasi multi-channel untuk penyebarluasan standar instrumen pertanian, sehingga produk terstandar memiliki kompetensi, akses pasar, dan saling terkoneksi.
4. Reinvestasi infrastruktur dan penguatan aspek sumberdaya manusia (*new human capital*).

Penajaman Rencana strategis ini tetap berpegang pada koridor tugas pokok dan fungsi utama yang diemban BPSIP Kalimantan Barat untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023. Rencana Strategis (Renstra) BPSIP Kalimantan Barat diarahkan demi terlaksananya penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Struktur rencana strategis ini, secara komprehensif dijabarkan dalam visi, misi, strategi utama, tujuan, sasaran dan program serta indikator kinerja utama.

Visi

Menjadi pusat unggulan dalam penerapan standar instrumen pertanian di Kalimantan Barat, yang mendorong pertumbuhan dan inovasi sektor pertanian untuk mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.

Misi

1. Mengembangkan dan menerapkan standar instrumen pertanian yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan lokal, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.

2. Mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi kepada para petani, agar dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi tantangan pertanian modern.
3. Membangun kelembagaan yang kuat untuk mendukung penerapan standar bidang pertanian, sehingga hasilnya dapat segera diimplementasikan di lapangan.
4. Melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, memberikan dukungan teknis kepada pelaku pertanian dalam mengadopsi dan memahami standar yang telah ditetapkan.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama yang erat dengan pihak-pihak terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional, guna mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam sektor pertanian.
6. Menjadi agen perubahan yang berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan kawasan pertanian industrial yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Tujuan

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP pangan berkualitas.

Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
2. Meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

3.2 Sasaran dan Target Kinerja BPSIP Kalimantan Barat

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Negara/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit Kementerian Negara/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagai instansi pemerintah menjabarkan program sebagai instrumen kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi pembiayaannya (anggaran). Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang terukur dapat dilakukan dengan pengeralahan sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, sumber daya uang (dana/anggaran), atau dengan kombinasi sumber daya tersebut. Program dapat terdiri satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan satu atau beberapa satuan kerja. Dalam istilah perencanaan pada lingkup Kementerian Pertanian pada eselon 2 atau unit

kerja dengan eselon dibawahnya, telah disepakati pada level tersebut digunakan istilah aktivitas dalam standar kinerja.

Tabel 3. Standar Kinerja BPSIP Kalimantan Barat

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Perspektif
Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Customer
	2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Customer
Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Customer
Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Learning and Growth
Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	Kepala BPSIP Kalimantan Barat	Learning and Growth

Sumber: PK BPSIP Kalimantan Barat 2023

Kinerja BPSIP dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya, yang diukur dengan Indikator Kinerja (IK). BPSIP Memiliki 5 (lima) IK, yaitu: (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga), (3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit), dan (4) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai), dan (5) Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai).

Tabel 3 dapat dijelaskan tentang standar kinerja BPSIP Kalimantan Barat yang disusun berdasarkan sasaran program Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Indikator Kinerja BPSIP Kalimantan Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2023. Sasaran dan strategi tersebut beserta indikator capaian akan menjadi acuan bagi langkah BPSIP Kalimantan Barat ke depan, yang secara umum disampaikan dalam bentuk langkah-langkah operasional.

1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BPSIP Kalimantan Barat sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata apa, bagaimana, serta dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan, termasuk hasil-hasil kegiatan terkait penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian lingkup BPSIP Kalbar. Berbagai program yang dilakukan oleh BPSIP Kalbar sepenuhnya untuk mendukung empat target sukses Kementerian Pertanian yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Perencanaan Kinerja tak terlepas dari Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dari Perjanjian kinerja inilah disusun Perencanaan Kinerja tahun berjalan. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; (2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	4506.5

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	91

Sumber: PK BPSIP Kalimantan Barat TA. 2023

Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa BPSIP Kalimantan Barat telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023 dan disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2023 BPSIP Kalimantan Barat didukung dengan Anggaran yang tertuang pada DIPA BPSIP Kalimantan Barat sebesar Rp. 10.678.760.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | Rp. 2,526,400,000,- |
| 2 | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | Rp. 1,384,000,000,- |
| 3 | Program Dukungan Manajemen | Rp. 6,768,360,000,- |

Tabel 5. Rincian Kegiatan Tahun 2023

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			2,526,400,000
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Abdullah Umar, SP., M.Sc.	84,751,000
2	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian:		
a	Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian	Agus Subekti, SP., MP.	150,720,000
b	Taman Agrostandar	Tietyk Kartinaty, SP., MP.	49,000,000

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.)
c	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat	Agus Subekti, SP., MP.	200,000,000
3	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	Ir. Revi Marsusi	28,700,000
4	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Agus Subekti, SP., MP.	114,879,000
5	Laboratorium Terstandar	Astri Oktafiani, SP., M.Sc.	198,350,000
6	Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare)	M. Zuhran, SST., MP.	1,700,000,000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			1,384,000,000
7	Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar	Ir. Sari Nurita	95,700,000
8	Bimbingan Teknis Perbenihan Standar	Sri Sunardi, SST.	1,188,300,000
9	Perbenihan Tanaman Perkebunan Terstandar	Sution, SP., MP.	100,000,000
Program Dukungan Manajemen			6,768,360,000
10	Dukungan Manajemen, Fasilitasi, dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Sri Sunardi, SST.	1,929,478,000
11	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Sri Sunardi, SST.	4,838,882,000
Total Anggaran			10.678.760.000

Sumber: DIPA BPSIP Kalimantan Barat TA. 2023

Tabel 5 terlihat bahwa anggaran kegiatan yang terlaksana di BPSIP Kalimantan Barat yang telah disusun mendukung pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 meliputi kegiatan diseminasi standar, pengembangan model kawasan agribisnis, perbenihan dan layanan pemeliharaan perkantoran.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolak ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja Instansi/unit kerja pelaksanaannya.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) Harus fleksibel dan sensitif dan (6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam penyusunan dan penetapan indikator kinerja dalam kaitannya dengan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menyusun dan menetapkan rencana strategis lebih dulu, (2) Melakukan identifikasi data informasi yang dapat

dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja, dan (3) Memilih dan menetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan:

1. Pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan (Form 1)
2. Pencapaian perjanjian kinerja 5 tahun terakhir (Form 2)
3. Pencapaian perjanjian kinerja dibandingkan target renstra (Form 3)
4. Analisis efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Form 4)

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Sampai dengan akhir tahun 2023, target yang ditetapkan sudah tercapai seperti dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6. Pengukuran Kinerja BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihilangkan (Unit)	4506,5	4509,88	100,08
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	82	83,01	101,23
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	91	93,21	102,43

Tabel 6 menunjukkan bahwa kinerja BPSIP Kalimantan Barat pada tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil yang telah mencapai

keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada tahun tersebut (**sangat berhasil**). Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan, Tim Penanggungjawab kegiatan di masing-masing unit pelaksan teknis (UPT) untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (Penyuluh, PMHP, Analis PSP, POPT, Calon Teknisi Litkayasa, dan tenaga administrasi) dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan kegiatan.

Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) sangat berhasil jika capaian $\geq 100\%$; 2) berhasil jika capaian 80-100%; 3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan 4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

3.3 Analisis Capaian Kegiatan

Penjelasan terkait pencapaian masing-masing sasaran kegiatan utama BPSIP Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	5. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100
		6. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100

Peningkatan pengelolaan standar instrumen pertanian menjadi salah satu sasaran strategis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat yang didukung melalui pencapaian indikator kinerja yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan target 1

SNI dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 Lembaga. Berdasarkan hasil dari target berhasil diperoleh 1 SNI dan 1 Lembaga atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**.

Indikator Kinerja pada Sasaran 1 dicapai melalui kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

No	Output	Target	Capaian
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	1 SNI	1 SNI
2	Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian: - Taman Agrostandar - Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi - Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat	185 orang	185 orang DIPA BLOKIR
3	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	1 Lembaga	1 Lembaga
4	Laboratorium Terstandar	1 Unit	1 Unit
5	Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare)	1 Lembaga	1 Lembaga

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan

Kegiatan Identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan penerapan standar pada komoditas jeruk siam dan lidah buaya di Kalimantan Barat. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup survei kuesioner, wawancara petani, serta serangkaian Focus Group Discussions (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjangkau kebutuhan standar dan penerapan standar eksisting. Beberapa temuan dari kegiatan identifikasi standar antara lain:

- a. Semua petani dan pemangku kepentingan (100%) menganggap penting adanya SNI/standar buah, perbenihan, budidaya, dan sistem pertanian jeruk siam, dengan tingkat kebutuhan sebagian besar tinggi atau sangat tinggi.
- b. Sebagian besar petani dan pemangku kepentingan (95,24%) menilai penting atau sangat penting adanya standar pelepah lidah buaya, namun kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Sementara itu, hampir seluruh responden (90,47%) menilai penting atau sangat penting adanya standar

budidaya lidah buaya, dan merasa sangat mendesak untuk menerapkannya. Hal ini menunjukkan tingkat kebutuhan dan kesadaran yang berbeda terhadap standar komponen mutu dan standar komponen budidaya lidah buaya.

- c. Secara umum petani jeruk memiliki minat dan kesadaran yang tinggi terhadap manfaat penerapan standar, seperti SOP PTKJS dan Bujangseta, yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, serta memenuhi permintaan pasar. Namun, adopsi standar tersebut masih rendah karena adanya hambatan seperti biaya, kompleksitas, dan kesulitan penerapan standar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan membimbing petani dalam menerapkan standar, seperti pendampingan dan dukungan teknis lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk merencanakan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan, diantaranya:

- a. Mengajukan proposal SNI untuk buah jeruk siam yang mencerminkan kebutuhan dan preferensi pasar, baik domestik maupun internasional, serta dapat diterapkan oleh petani lokal dengan mudah dan efektif.
- b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap standar dalam produksi jeruk siam, serta memberikan bimbingan dan evaluasi dalam proses penerapan standar tersebut.
- c. Memberikan dukungan teknis yang memadai dan konsisten bagi petani dalam mengimplementasikan standar, seperti penyediaan sarana, prasarana, bantuan finansial, insentif, sertifikat, dan lain-lain, serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk jeruk siam yang dihasilkan.
- d. Membangun kolaborasi yang kuat dan harmonis antara pemerintah, lembaga penelitian, industri, dan kelompok tani untuk memastikan kesuksesan implementasi standar, serta untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin muncul, seperti perubahan iklim, persaingan pasar, regulasi, dan lain-lain.

Hasil lain yang dicapai dari kegiatan identifikasi kebutuhan standar ini diantaranya: 1 dokumen usulan PNPS tentang standar buah jeruk siam, 1 publikasi artikel ilmiah tingkat nasional, dua kali pelaksanaan FGD identifikasi kebutuhan dan penerapan standar jeruk dan lidah buaya, pengumpulan data (wawancara) kebutuhan dan penerapan standar bagi petani, kelompok dan pelaku usaha komoditi jeruk sebanyak 15 responden dan lidah buaya 21 responden.



Gambar 6. Koordinasi kegiatan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas (kiri) dan penangkar benih jeruk (kanan) sebagai para pemangku kepentingan standar



Gambar 7. Pelaksanaan FGD identifikasi standar jeruk siam yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas (kiri) dan identifikasi standar lidah buaya di Kota Pontianak (kanan).

2. Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah BSIP, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.13 Tahun 2023 memiliki tugas pokok melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, dalam melaksanakan tugas tersebut, BPSIP Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi terkait diseminasi standar instrumen pertanian yaitu: 1) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, 2) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, maka penerapan standar instrumen pertanian oleh lembaga/pelaku usaha pertanian, khususnya di Kalimantan Barat, merupakan hasil akhir dari keberhasilan BPSIP Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penerapan standar instrumen pertanian oleh pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari produk pertanian yang dihasilkan, karenanya informasi terkait standar instrumen pertanian yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh para pelaku usaha

dibidang pertanian. Informasi terkait standar instrumen pertanian masih sedikit diketahui oleh pengguna/pelaku usaha di bidang pertanian, untuk itu diperlukan penyediaan informasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha/benefeciaries di daerah yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan daya saing produk pertanian, kegiatan komunikasi dan diseminasi hasil standar instrumen pertanian untuk mempercepat penyebarluasan dan penerapannya. Tujuan kegiatan pada tahun 2023 adalah melakukan diseminasi hasil standar instrumen pertanian melalui kegiatan: 1) Penyusunan dan penyebarluasan materi informasi tercetak dan elektronik terkait standar instrumen pertanian dalam bentuk brosur, leaflet/folder poster, dan video; 2) Bimbingan teknis (Bimtek) terkait standar instrumen pertanian, 3) Demonstrasi teknologi berupa pameran, dan demplot, 4) Penyebaran informasi secara elektronik terkait standar instrumen pertanian melalui media online.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terdiseminasinya hasil standar instrumen pertanian kepada 125 orang petani/pelaku usaha/petugas bidang pertanian melalui kegiatan: 1) Penyusunan dan penyebarluasan materi informasi standar instrumen pertanian dalam bentuk brosur 1 judul, leaflet/folder 4 judul, poster/banner 7 judul, video 2 judul; 2) Bimbingan teknis terkait standar instrumen pertanian 4 kali; 3) Kegiatan demonstrasi berupa pameran 1 kali dan demplot 1 unit; 4) Penyebaran informasi standar instrumen pertanian melalui website 10 kali. Hasil kegiatan diseminasi hasil standar instrumen pertanian telah dilakukan dalam upaya memperderas penyebaran informasi terkait standar instrumen pertanian yang telah dihasilkan sebagai berikut : 1) Kegiatan penyusunan materi tercetak dalam bentuk brosur sebanyak 1 judul, folder/leaflet sebanyak 4 judul, poster 7 judul, dan video 2 judul, 2) Kegiatan Bimtek dilakukan dengan sasaran 215 orang yang terdiri dari petani, petugas, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, yang dilaksanakan empat kali. Materi yang disampaikan meliputi SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik, SNI:6233-2015 tentang Benih Padi Inbrida, SNI 7763:2018 tentang Pupuk Organik Padat, GAP Bujangseta Jeruk, GAP Hidroponik, SNI 3166-2009 tentang Standar Mutu Nenas, 3) Kegiatan pameran dan promosi produk terstandar dilaksanakan pada peringatan HUT BSIP ke-1, dengan menampilkan produk-produk terstandar diantaranya nanas organik, benih padi, benih hortikultura alpukat, durian, dan jeruk. Dalam kegiatan pameran juga dipamerkan standar instrumen pertanian yang penerapannya wajib dan sukarela dalam bentuk media cetak dan video. Jumlah pengunjung pada kegiatan pameran ini sebanyak 116 orang yang terdiri dari penyuluh, POPT, petani, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, 4) Kegiatan Penyebaran media informasi tercetak dilakukan melalui kunjungan ke kelompok tani dan instansi terkait. Materi yang didiseminasikan terdiri dari SNI 6729:2016_Sistem Pertanian Organik; SNI:6233-2015 (Benih Padi Inbrida) ; SNI 7763:2018_Pupuk Organik Padat; GAP Bujangseta Jeruk; GAP Hidroponik ; SNI 3166-2009_Standar Mutu

Nenas ; SNI 3741 : 2013_Minyak Goreng ; SNI 6128: 2020_Beras ; SNI 01-0004-1995_Standar Mutu Lada Putih dan SNI 01-0005-1995_Standar Mutu Lada Hitam, 5) Kegiatan demonstrasi plot (Demplot) buah berjenjang sepanjang tahun (Bujangseta) tanaman jeruk dilakukan sebanyak 1 unit.



Gambar 8. Poster tujuh SNI wajib dibidang pertanian



Gambar 9. Brosur Sistem Pertanian Organik (SNI : 6729-2016), Leaflet standar mutu nenas (SNI : 3166-2009), dan Folder GAP Bujangseta Jeruk



Gambar 10. Stand Pameran Produk Pertanian Pada Kegiatan Gebyar Agrostar



Gambar 11. Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Dalam Bentuk Media Cetak



Gambar 12. Bimbingan Teknis GAP BUJANGSETA

3. Taman Agrostandar

Taman Agrostandar sebagai suatu konsep atau model inovasi teknologi dalam pemanfaatan pekarangan dengan berbagai macam budidaya tanaman yang dikemas sebagai taman (agrowidyawisata). Diseminasi Inovasi teknologi yang didisplay dan ditata dalam pengelolaan Taman Agrostandar sebagai suatu taman yang rapi dan mempunyai nilai estetika sehingga diharapkan akan memberikan daya tarik bagi calon pengguna teknologi dan sekaligus akan menimbulkan minat untuk menerapkan nantinya. Kegiatan ini diharapkan menjadi show window atau sarana percontohan bagi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan baik untuk pertanian perkotaan. Selain itu, pemanfaatan lahan pekarangan untuk taman agrostandar juga dapat membantu optimalisasi pemanfaatan lahan, sehingga lahan yang tadinya tidak dimanfaatkan dapat dijadikan sebagai lahan produktif.

Tujuan dari kegiatan Taman Agrostandar adalah:

- 1). Melakukan Inovasi budidaya tanaman di pekarangan yang terstandar meliputi budidaya sayuran hidroponik, budidaya sayuran dalam polybag/pot dan di lahan pekarangan dan pemeliharaan tanaman buah-buahan serta pembuatan pupuk organik cair,
- 2). Melakukan produksi benih semaian sayuran dalam mendukung keberlanjutan kegiatan Taman Agrostandar,
- 3). Melakukan pendampingan dan diseminasi inovasi budidaya tanaman dipekarangan terstandar dalam bentuk sebagai nara sumber, pertemuan/pelatihan, bimtek, layanan konsultasi perorangan.

Keluaran yang ingin dicapai meliputi:

- 1). Inovasi budidaya tanaman di pekarangan yang terstandar meliputi budidaya sayuran hidroponik, budidaya sayuran dalam polybag/pot dan di lahan pekarangan dan pemeliharaan tanaman buah-buahan dan pembuatan pupuk organik cair,
- 2). Produksi benih semaian sayuran dalam mendukung keberlanjutan kegiatan Taman Agrostandar,
- 3). Pendampingan dan diseminasi inovasi budidaya tanaman dipekarangan terstandar dalam bentuk sebagai nara sumber, pertemuan/pelatihan, bimtek, layanan konsultasi perorangan.

Hasil yang telah dicapai meliputi:

- 1) Model inovasi teknologi budidaya pekarangan yang dilakukan mengacu pada SOP/Juknis/PTM meliputi
 - a) Budidaya sayuran di lahan: Kubis, Kubis bunga, Tomat,
 - b) budidaya sayuran dalam polybag/pot/bak tanaman meliputi: terung, cabe rawit cakra putih, Labu golden Mama dan Labu Kundur, Kubis Bunga, bayam, tanaman toga
 - c) Budidaya sayuran hidroponik sebanyak meliputi sawi pak coy, sawi keriting, sawi putih, selada,
 - d) Penataan dan Pemeliharaan berkelanjutan tanaman di pekarangan meliputi : penataan tanaman hias di areal kolam, lidah buaya serta pemeliharaan tanaman buah-buahan serta tabulampot,
 - e) Pembuatan Pupuk Organik Bacillus dan JAKABA dengan hasil analisis laboratorium pupuk organik Cair Bacillus yaitu pH berkisar 3,65, kandungan Carbon Organik sebesar 0,09 %, Nitrogen total sebesar 0,02 %

dan C/N rasio yaitu 4,50. Hasil analisis laboratorium Pupuk Organik Cair JAKABA menunjukkan pH yaitu 6,05, Carbon Organik 0,17 %, Nitrogen total 0,04 % dan C/N Rasio sebesar 4,25., 2) Produksi benih semaian sebanyak 3.500 benih yaitu Tomat, terung, cabe rawit, kubis bunga dengan sebaran yang telah didiseminasikan sebanyak 2.195 polybag kepada penerima manfaat yaitu kelompok, masyarakat, perorangan, pondok pesantren, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Tani, P2L, Pemuda HKTI, PKK, Yayasan, serta insan pertanian lainnya dan 1.305 polybag penguatan benih untuk keberlanjutan kegiatan Taman Agrostandar dan 3). Pendampingan dan diseminasi budidaya pekarangan meliputi Nara sumber Bimtek, layanan kunjungan perorangan, konsultasi perorangan dan diseminasi SNI pupuk organik Padat, SNI sistem pertanian organik dan PTM budidaya Hidroponik kepada KWT, siswa, mahasiswa, kelompok tani, P2L, masyarakat, instansi terkait maupun perorangan. Karakteristik Pengunjung Taman Agrostandar sebanyak 63 orang: berdasarkan jenis kelamin (Laki-Laki 22 orang, perempuan 41 orang) dan Umur (19 – 40 tahun sebanyak 36 orang dan 41 – 70 tahun sebanyak 27 orang).



Gambar 13. Pertanaman Budidaya Sayuran di Lahan Pekarangan BPSIP Kalimantan Barat



Gambar 14. Pertanaman Budidaya Sayuran dalam Polybag/Rak/Pot kegiatan Taman Agrostandar



Gambar 15. Budidaya Sayuran Hidroponik Kegiatan Taman Agrostandar



Gambar 16. Bimtek Hidroponik Kegiatan Taman Agrostandar BPSIP Kalimantan Barat



Gambar 17. Layanan Kunjungan dan Konsultasi Budidaya Sayuran Kegiatan Taman Agrostandar



Gambar 18. Kegiatan Pendampingan Teknologi Taman Agrostandar



Gambar 19. Penyerahan Benih semaian Polybag sayuran kegiatan Taman Agrostandar

4. Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

Penyusunan materi penyuluhan pertanian bertujuan untuk menyediakan informasi tertulis dalam bentuk tercetak seperti folder dan brosur. Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya 2 judul brosur dan 3 judul folder komoditas pertanian terstandar. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan penerapan standar instrumen pertanian yang didiseminasikan. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat. Ruang lingkup kegiatan meliputi koordinasi, penetapan materi, penyusunan draft, perbaikan, perbanyak dan penyebarluasan.

Materi penyuluhan berbentuk brosur antara lain SNI 6128 : 2020 tentang Beras dan SNI 7763 : 2018 tentang Pupuk Organik Padat, sedangkan bentuk folder berjudul SNI 01-0004 : 2013 tentang Lada Putih, SNI 01-0005 : 2013 tentang Lada Hitam, dan SNI 2741 : 2013 tentang Minyak Goreng. Materi dalam bentuk brosur diperbanyak sejumlah 50 eksemplar setiap judul, sedangkan materi dalam bentuk folder diperbanyak sejumlah 500 eksemplar setiap judul.

Penyebaran materi telah dilakukan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota antara lain di Kabupaten Sintang, Melawi, Mempawah, Kubu Raya, Bengkayang, Sambas dan Kota Pontianak melalui bimtek dan kunjungan ke BPP dan Kelompok Tani.

Tabel 9. Penyebaran Materi Penyuluhan (Leaflet dan Brosur) melalui Bimbingan Teknis

No	Lokasi Bimbingan Teknis	Materi	Jumlah Eksemplar
1	Kabupaten Melawi	1. SNI Lada Putih	50
		2. SNI Lada Hitam	50
2	Kabupaten Sintang	1. SNI Lada Putih	50
		2. SNI Lada Hitam	50
3	Kabupaten Sambas	SNI Minyak Goreng	40
4	Kota Pontianak (HUT BSIP ke-I)	1. SNI Minyak Goreng	100
		2. SNI Lada Putih	100
		3. SNI Lada Hitam	100

Tabel 10. Penyebaran Materi Penyuluhan (Leaflet dan Brosur) melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

No	Lokasi BPP	Materi	Jumlah Eksemplar
1	BPP Toho	Pupuk Organik Padat (SNI 7763:2018)	10
2	BPP Rasau Jaya	Pupuk Organik Padat (SNI 7763:2018)	10
3	BPP Lumar	1. Beras (SNI 6128:2020)	2
		2. Lada Putih (SNI 0004:2013)	20
		3. Lada Hitam(SNI 0005:2013)	20
		4. Minyak Goreng (2741:2013)	5

No	Lokasi BPP	Materi	Jumlah Eksemplar
4	BPP Jungkat	1. Beras (SNI 6128:2020)	1
		2. Lada Putih (SNI 0004:2013)	10
		3. Lada Hitam(SNI 0005:2013)	10
		4. Minyak Goreng (2741:2013)	20
5	BPP Sungai Pinyuh	1. Beras (SNI 6128:2020)	1
		2. Lada Putih (SNI 0004:2013)	10
		3. Lada Hitam(SNI 0005:2013)	10
		4. Minyak Goreng (2741:2013)	20
6	BPP Mempawah Hilir	1. Beras (SNI 6128:2020)	2
		2. Lada Putih (SNI 0004:2013)	20
		3. Lada Hitam(SNI 0005:2013)	20
		4. Minyak Goreng (2741:2013)	20
7	BPP Pontianak Utara	1. Pupuk Organik Padat (SNI 7763:2018)	2
		2. Beras (SNI 6128:2020)	2
		3. Lada Putih (SNI 0004:2013)	5
		4. Lada Hitam(SNI 0005:2013)	5
		5. Minyak Goreng (2741:2013)	5
8	BPP Pontianak Barat	1. Pupuk Organik Padat (SNI 7763:2018)	3
		2. Beras (SNI 6128:2020)	5
		3. Lada Putih (SNI 0004:2013)	12
		4. Lada Hitam(SNI 0005:2013)	12
		5. Minyak Goreng (2741:2013)	12



Gambar 20. Penyebaran Materi

5. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian

BPSIP Kalimantan Barat merupakan perpanjangan tangan BSIP di daerah yang mempunyai tupoksi melakukan penerapan standardisasi instrumen pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan kebijakan, kondisi sumberdaya alam, sosial ekonomi pertanian dan budaya masyarakat yang bermuara pada keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani, produsen dan ketahanan pangan yang kokoh. Dalam menghadapi arus globalisasi tersebut, sektor pertanian harus mampu bersaing dalam peningkatan mutu barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendekatan sistem agribisnis yang difokuskan kepada komoditas unggulan daerah maupun nasional. Dalam pendekatan ini, keterlibatan aktif pihak swasta, petani, dan pemerintah sangat diharapkan sehingga program pembangunan dapat dilakukan secara terpadu.

Sejalan dengan hal tersebut, sistem pertanian yang dikembangkan harus menghasilkan produk yang memiliki daya saing melalui proses transformasi dari usahatani tradisional ke arah usahatani maju yang berorientasi pasar. Selain itu produk pertanian yang dihasilkan oleh lembaga/organisasi/pelaku usaha di bidang pertanian harus memiliki kualitas yang baik dan aman untuk di konsumsi, hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan standar instrumen pertanian. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar resmi yang berlaku di Indonesia. Untuk sector pertanian, telah banyak standar instrumen pertanian yang telah dihasilkan seperti SNI perbenihan, SNI produk segar dan olahan, SNI alat dan mesin, maupun SNI pupuk dan pestisida, hanya saja informasi dan penerapan standar SNI pertanian tersebut masih kurang dipahami dan dilaksanakan oleh *stakeholders* terkait seperti pelaku usaha dan pembina mutu di daerah. Oleh karena itu untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan standar instrumen pertanian yang telah dihasilkan maka perlu dilakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi penerapan standar instrumen pertanian, sehingga SNI dibidang pertanian yang telah dihasilkan dapat terinformasikan dan diterapkan oleh lembaga/organisasi/pelaku usaha.

Tujuan kegiatan pada tahun 2023 adalah Melakukan pendampingan dan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian terhadap lembaga/pelaku usaha di Kalimantan Barat. Keluaran kegiatan pada tahun 2023 1 (satu) lembaga/organisasi/pelaku usaha bidang pertanian terdampingi untuk menerapkan standar instrumen pertanian. Ruang lingkup kegiatan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian ini adalah: 1) Sosialisasi SNI yang akan diterapkan oleh lembaga/pelaku usaha, 2) melakukan Bimtek agar produk yang dihasilkan oleh lembaga/pelaku usaha memenuhi standar instrumen pertanian yang telah ditetapkan, 3) pendampingan dan fasilitasi terhadap lembaga/pelaku

usaha dalam penerapan standar instrumen pertanian dari produk yang dihasilkan. Hasil dari kegiatan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian yang telah dilakukan sebagai berikut : Kegiatan pendampingan pada komoditas nanas di Poktan Harapan Baru Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah adalah : a) Koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan sosialisasi terkait SNI 6729:2016 tentang system pertanian organik dan Standar Mutu Nanas (SNI 3166:2009), b) penyelesaian dokumen hasil temuan ketidaksiesuaian hasil inspeksi yang dilakukan oleh Tim dari Lembaga Sertifikasi Organik ICERT, sehingga pada saat ini Poktan Harapan Baru telah memperoleh sertifikat organik dari ICERT dengan No. Lisensi : ICERT-1180/LSP-095-IDN/6/23, dengan masa berlaku mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 5 Juni 2026; b) telah dilakukan bimbingan teknis kepada anggota Poktan Harapan Baru dan petugas lapang sebanyak 50 orang terkait Standar Mutu Nanas (SNI 3166:2009); dan Bimtek kepada 45 anggota Poktan Harapan Baru dan petugas terkait SNI 6729:2016 tentang system pertanian organik, dan SNI 7763:2018 tentang pupuk organik padat c) Pendampingan budidaya nanas dengan menerapkan system pertanian organik di lapangan, melalui kegiatan pembuatan dan aplikasi pupuk organik, serta pemeliharaan lahan secara organik; d) Selain itu juga dilakukan fasilitasi pembuatan label nanas organik, promosi, dan pemasaran terhadap buah nanas organik varietas Madu Galang. 2) Kegiatan pendampingan pada komoditas kelapa di Desa Bakau Besar Darat Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah adalah : a) Koordinasi dengan PT. MIO terkait rencana pendampingan penerapan standar system pertanian organik yang akan dilakukan oleh BSIP Kalimantan Barat, b) Koordinasi dan sosialisasi terkait Sistem Pertanian Organik (SNI 6729:2016) kepada Poktan Sepakat Berjaya, c) Pendampingan budidaya kelapa secara organik melalui kegiatan Bimtek kepada Poktan Harapan Baru dan petani kelapa sekitarnya terkait SNI 6729:2016 tentang system pertanian organik, dan SNI 7763:2018 tentang pupuk organik padat.



Gambar 21. Bimtek Standar Mutu Nenas (SNI 3166:2009) di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten mempawah



Gambar 22. Pendampingan penerapan budidaya nanas sesuai SNI: 6729:2016



Gambar 23. Sertifikat Organik dari ICERT kepada Poktan Harapan Baru



Gambar 24. Label produk buah segar nanas organik madu galang



Gambar 25. Promosi nanas organik Madu Galang melalui kegiatan pameran



Gambar 26. Bimtek SNI 6729:2016 tentang sistem pertanian organik, dan SNI 7763:2018 tentang pupuk organik padat di Desa Bakau Besar Darat

6. Laboratorium Terstandar

UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan mengamanatkan bahwa sarana budi daya pertanian harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, telah membentuk organisasi baru yang berperan dalam menjalankan amanat tersebut yaitu Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Sebagai turunan dari perpres tersebut diterbitkan Permentan No 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang mengatur tentang pembentukan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) dengan salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Pelaksanaan fungsi tersebut dijalankan melalui kegiatan laboratorium terstandar. Saat ini layanan yang dapat diberikan oleh Laboratorium Penguji BPSIP Kalbar berupa layanan pengujian kimia tanah. Laboratorium penguji BPSIP Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang prima dengan akurasi data yang tinggi dan valid, cepat dan berkualitas. Untuk mencapai hal

tersebut, laboratorium perlu didukung oleh SDM yang memadai baik jumlah, kompetensi dan keterampilannya, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan manajemen.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 antara lain: identifikasi kebutuhan yang diperlukan (kebutuhan pelatihan, bahan dan alat), penentuan standar yang akan digunakan dalam laboratorium terstandar, penyiapan dokumen (dokumen mutu seperti pedoman mutu, prosedur mutu, instruksi kerja dan formulir/rekaman), penyiapan peralatan yang digunakan dalam laboratorium terstandar, penyiapan personil, audit internal, proses akreditasi dan operasionalisasi laboratorium (pemeliharaan peralatan laboratorium, serta pengendalian mutu hasil analisis melalui kalibrasi dan uji profisiensi dan peningkatan kapasitas SDM melalui training, dan pelaksanaan pengujian).



Gambar 27. Rapat persiapan dan sosialisasi dokumen mutu laboratorium



Gambar 28. Uji Fungsi Madgetech Pressure, Humidity, Temperature Data Logger



Gambar 29. Proses Kalibrasi In situ Peralatan Laboratorium



Gambar 30. Training verifikasi fungsi alat dan metode pengujian menggunakan Vapodest oleh PT. Abadi Nusa Usaha Semesta

7. Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare)

Agribisnis jeruk dan padi di Kabupaten Sambas menghadapi beberapa masalah baik di sektor budidaya, pengolahan, maupun pemasaran. Masalah-masalah tersebut juga berkaitan dengan kelembagaan petani yang jumlah sedikit dan belum berfungsi optimal. Beragam masalah ini mencerminkan lemahnya rantai nilai jeruk dan padi sebagai suatu kawasan pertanian. Oleh karena itu, pengembangan agribisnisnya jeruk dan padi sebaiknya menggunakan pendekatan pengembangan kawasan melalui penguatan rantai nilai komoditas yang melibatkan korporasi petani sebagai basis peningkatan nilai tambah produk. Upaya ini dilakukan melalui Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)* berupa Kegiatan Pengembangan Model Kawasan Jeruk-Padi Berbasis Inovasi dan Korporasi Pertanian di Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kawasan dan rantai nilai jeruk-padi yang terkelola secara

berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Sambas. Program ICARE dilaksanakan pada tahun 2023-2027.

Kegiatan ICARE pada tahun 2023 meliputi persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Persiapan kegiatan terdiri dari penyusunan proposal dan anggaran kegiatan serta penelitian lanskap pertanian. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi dan sosialisasi program di kawasan yakni di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing komponen ICARE adalah sebagai berikut.

Komponen A. Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian Terpilih

A.1. Pengelolaan Model Kawasan Pertanian dan Rantai Nilai

A.1.1. Verifikasi Kecamatan Lokasi Program dan Penerima Manfaat serta Penilaian Kinerja Rantai Nilai Eksisting di Level Kabupaten secara Partisipatif

- 1) Verifikasi kecamatan lokasi program dan penerima manfaat
 - a) Penentuan calon petani calon lokasi (CPCL)

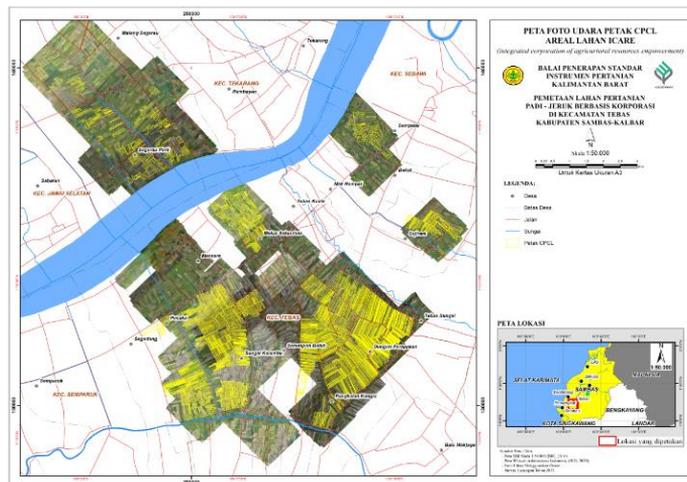
Kecamatan lokasi program ICARE telah ditetapkan adalah di Kecamatan Tebas. Luas kawasan program ICARE 1.208,75 ha yang terdiri jeruk monokultur 315,04 ha, padi monokultur 831,54 ha, dan tumpang-sari jeruk-padi 62,17 ha yang tersebar di 10 desa dengan jumlah poktan 77 kelompok yang terdiri dari 2.816 petani. Daftar CPCL ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas.



Gambar 31. Penentuan CPCL Program ICARE

b) Analisis tanah dan penyusunan peta geospasial

Investigasi sumberdaya lahan dilakukan pada 99 titik pengamatan dengan jumlah sampel tanah sebanyak 195 sampel dan citra udara pada 75 jalur terbang di lokasi program. Dari 195 sampel tanah, 43 sampel diantaranya telah dianalisis sesuai ketersediaan anggaran analisis tanah. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan serta data-data pendukung lainnya, telah dihasilkan 11 peta geospasial yakni (1) titik lokasi CPCL, (2) petak lahan CPCL, (3) foto udara petak CPCL, (4) batas administrasi desa lokasi CPCL, (5) jenis tanah, (6) kedalaman pirit, (7) sebaran OPT komoditas jeruk, (8) sebaran OPT komoditas padi, (9) kesesuaian lahan jeruk, (10) kesesuaian lahan padi, dan (11) infrastruktur pertanian pada lokasi CPCL.



Gambar 32. Peta foto udara petak CPCL

2) Penilaian kinerja rantai nilai eksisting

Berdasarkan jumlah *focal company*, rantai nilai (*value chain*) jeruk pada lokasi program terdiri dari 7 rantai pasok (*supply chain*) dengan kapasitas pemasaran bervariasi antar *focal company* dari yang terkecil 88 ton/bulan hingga terbesar 648 ton/bulan dengan tujuan pemasaran ke beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat, luar Provinsi Kalimantan Barat seperti Jakarta, Batam, Yogyakarta, dan Semarang, hingga ke luar negeri yakni Malaysia. Sementara pada rantai nilai komoditas padi, diketahui bahwa 50% petani menjual gabahnya kepada pengepul dan unit mesin penggilingan padi (Rice Milling Unit/RMU). Di Kecamatan Tebas, terdapat 13 rantai nilai gabah dan beras dengan beberapa diantaranya merupakan RMU besar sebagai *focal company* dengan kapasitas pengolahan bervariasi antar *focal company* mulai dari 1.875 hingga 41.667 ton gabah/bulan. Pemasaran beras dari *focal company* umumnya ditujukan kepada pedagang besar di

Singkawang, Pontianak, dan Pemangkat serta para pedagang pengecer di Kabupaten Sambas.



Gambar 33. Survei penilaian kinerja rantai nilai eksisting komoditas jeruk dan padi

A.1.2. Penyusunan Rencana Agribisnis Tingkat Kawasan dan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan

1) Penyusunan rencana agribisnis tingkat kawasan

Rencana agribisnis tingkat kawasan pengembangan jeruk dan padi berbasis korporasi petani disusun dan disepakati melalui workshop berdasarkan gap analysis terhadap kondisi yang diharapkan dan kondisi eksisting saat ini.



Gambar 34. Model agribisnis tingkat kawasan komoditas jeruk dan padi berbasis korporasi petani

2) Fasilitasi kerja sama pemangku kepentingan publik-swasta untuk perencanaan dan aksi bersama

Penyusunan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan publik dan swasta pada Program ICARE dilakukan melalui FGD. Kegiatan ini menghasilkan 1 MoU dukungan para pihak terhadap Program ICARE di Kalimantan Barat. Selain itu, dalam FGD ini juga disepakati perjanjian kerjasama bisnis antara KEP Tebas Gemilang Jaya dengan PT. Sang Hyang

Seri (SHS) Kalimantan Barat dalam pemasaran benih padi inbrida sebanyak 50 ton pada tahun 2024.

A.2. Dukungan Pembentukan Korporasi Petani

A.2.1. Penggabungan Poktan ke Dalam Korporasi Petani dan Penguatan Kemampuan Teknis, Bisnis, Finansial, dan Organisasi

1) Dukungan dan fasilitasi pembentukan kelompok tani dan pengembangan korporasi petani

Hasil kegiatan ini adalah terbentuknya 3 korporasi petani baru di lokasi program yakni KEP Segarau Bangun Tani, Koperasi Sungai Kelambu Sejatera, dan Koperasi Tebas Mekar Bersatu, serta 1 korporasi petani eksisting yakni KEP Tebas Gemilang Jaya. Keempat koperasi ini sudah berbadan hukum dengan jumlah anggota dari 4 korporasi petani ini sebanyak 659 orang dengan total luas lahan jeruk dan padi 360,76 ha.



Gambar 35. Pembentukan dan fasilitasi anggota korporasi petani

2) Peningkatan keterampilan teknis, bisnis, dan keuangan bagi petani dan pengusaha tani muda dalam poktan/gapoktan dan korporasi petani

Kegiatan ini dilakukan melalui 2 kali bimbingan teknis manajemen korporasi petani dengan total peserta 78 orang serta pelatihan teknis usahatani jeruk dan padi dengan total peserta 190 orang. Kegiatan ini telah meningkatkan pengetahuan peserta tentang praktik pertanian ramah lingkungan serta pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap usaha tani.



Gambar 36. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi petani dan pengusaha tani muda dalam poktan/gapoktan dan korporasi petani

A.2.2. Penyusunan Rencana Bisnis Korporasi Petani

Rencana bisnis petani disusun berdasarkan kesepakatan anggotanya dan disesuaikan dengan potensi bisnis serta rencana bisnis tingkat kawasan. Rencana bisnis KEP Segarau Bangun Tani terdiri dari perbenihan jeruk, pemasaran buah jeruk, toko sarana produksi pertanian, dan budidaya jeruk. Rencana bisnis Koperasi Sungai Kelambu Sejatera terdiri dari perbenihan padi, distribusi saprodi (terutama padi), kemitraan pemasaran padi, pembiayaan usaha pengolahan produk turunan padi, dan budidaya padi. Rencana bisnis Koperasi Tebas Mekar Bersatu meliputi budidaya padi, toko sarana produksi pertanian, UPJA, pemasaran padi, produksi dan pemasaran beras dalam kemasan, serta UPPO. Rencana bisnis KEP Tebas Gemilang Jaya yang meliputi produksi dan pemasaran beras dalam kemasan, produksi tepung beras, UPPO, toko sarana produksi pertanian, budidaya padi, dan UPJA.

A.2.3. Fasilitasi Dana Pendampingan untuk Rencana Bisnis Korporasi Petani

Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan dengan pengurus dan penyuluh pendamping dari korporasi petani yang sudah terbentuk yang menghasilkan rancangan penyediaan kebutuhan peralatan, mesin, input produksi, dan infrastruktur berdasarkan rencana bisnis masing-masing korporasi petani.

Komponen B. Penguatan Kapasitas Institusi untuk Pengelolaan Rantai Nilai

B.2. Peningkatan Kapasitas Institusi

B.2.1. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah

Peningkatan kapasitas SDM pemerintah dilakukan melalui beberapa pelatihan yakni pelatihan penguatan kapasitas SDM pemerintah di lokasi program, pelatihan peningkatan kapasitas SDM pemerintah pada BPSIP Kalimantan Barat, serta pelatihan Geographic Information System (GIS). Pelatihan-pelatihan tersebut telah meningkatkan kapasitas 48 SDM pemerintah peserta pelatihan.



Gambar 37. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah

Komponen C. Manajemen Proyek

Manajemen proyek dilakukan melalui beberapa kegiatan berupa manajemen program, monitoring dan evaluasi, serta manajemen pengetahuan untuk peningkatan dan pengarusutamaan.

Sasaran Kegiatan (SK) 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	4506,5	4509,88	100,08

Peningkatan produksi instrumen pertanian menjadi salah satu sasaran strategis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Barat yang didukung melalui pencapaian indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan target 4506,5 Unit. Berdasarkan hasil dari target berhasil diperoleh capaian 4509,88 Unit atau sebesar 100,08% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**.

Indikator Kinerja pada Sasaran 2 dicapai melalui kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 12. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

No	Output	Target	Capaian
1	Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar		
2	Bimbingan Teknis Perbenihan Standar	6,5 Ton	6,88 Ton
3	Perbenihan Tanaman Perkebunan Terstandar	4500 Benih	4503 Benih

1. Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar

Benih merupakan komponen penting dalam usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi padi. Penggunaan benih varietas unggul bermutu berkontribusi cukup besar dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Walaupun demikian, penggunaan benih varietas unggul

bermutu di Kalimantan Barat masih rendah <50%, yang berakibat pada rendahnya produktivitas padi Kalbar. BPSIP Kalimantan Barat selaku kepanjangan tangan dari BSIP diminta untuk menyediakan benih tanaman pangan (padi) yang terstandar secara tepat sistim produksinya, tepat varietas, tepat waktu, tepat harga, tepat kelasnya, dan tepat distribusinya dengan memproduksi benih sumber. Benih ini nantinya diharapkan tersebar kepada pengguna, sekaligus memperkenalkan dan mendukung peningkatan indeks pertanaman, peningkatan produktivitas dan produksi padi. Selain itu, bantuan benih sumber ini diharapkan dapat dibenihkan lagi di penangkar di Kabupaten/Kecamatan/Desa agar nantinya dapat menjadi jalur benih antar lapang, sehingga petani tidak lagi tergantung kepada bantuan benih dari Pemerintah.

Kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar bertujuan untuk memproduksi benih sumber VUB padi yang bermutu serta mempromosikan dan mendistribusikan benih sumber bermutu VUB padi kepada pengguna. Keluarannya adalah benih sumber VUB padi yang bermutu sebanyak 6,5 ton dan terpromosikannya dan terdistribusinya benih sumber VUB padi bermutu kepada pengguna. Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IPPSIP) Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya seluas 3 Ha (2 Ha pada musim kemarau dan 1 Ha pada musin penghujan).

Kegiatan perbenihan tanaman pangan terstandar telah menghasilkan benih sumber padi sebanyak 6.880 kg atau 6,88 ton atau sebesar 105,8% dari benih yang ditargetkan sebanyak 6,5 ton. Benih yang dihasilkan terdiri dari varietas Inpari 37 (580 kg), Baroma (950 kg), Inpari 49 Jembar (1.900 kg), Padjadjaran Agritan (1.950 kg) dan Inpari Nutri Zinc (1.500 kg). Benih yang terdistribusi sampai saat ini sebanyak 1.150 kg (1,15 ton) dengan penerima manfaat dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, petani, kelompok tani dan penangkar yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang dan Sambas. Stock benih sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 5.730 kg (5,73 ton).



Gambar 38. Roguing pada fase generatif awal dan performa varietas Inpari 49 Jembar menjelang panen



Gambar 39. Benih di gudang UPBS BPSIP Kalimantan Barat dan penyerahan benih kepada ketua Poktan Karya Tani Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

2. Bimbingan Teknis Perbenihan Standar

Benih merupakan salah satu faktor penentu tingkat produksi bagi keberhasilan usaha tani. Penggunaan standar mutu benih berguna untuk memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi konsumen serta memberikan kepastian hukum atas produk benihnya bagi produsen. Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Standar membantu untuk menyelaraskan spesifikasi teknis produk dan jasa yang membuat industri lebih efisien dan meningkatkan daya saingnya untuk perdagangan internasional. Kesesuaian dengan Standar membantu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk lingkungan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait standar perbenihan tanaman pangan (mengacu pada SNI).

Bimbingan Teknis Perbenihan Standar di Kalimantan Barat dilakukan melalui metode pertemuan dengan narasumber oleh pihak-pihak yang kompeten dibidangnya. Peserta Bimtek berjumlah 600 orang yang terdiri dari petani dan atau penyuluh. Ruang lingkup dari kegiatan ini terdiri dari: 1) Persiapan, 2) Implementasi kegiatan di tingkat lapangan, terdiri dari lima kegiatan sebagai berikut: (a) koordinasi dan sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan Bimtek bersama Dinas/instansi di daerah; (b) penjangkaran materi Bimtek sesuai kebutuhan; (c) pelaksanaan bimbingan teknis; dan (d) evaluasi pelaksanaan Bimtek.

Materi yang dipilih disesuaikan tanaman pangan yang banyak dan cocok dibudidayakan di Kalimantan Barat sehingga tepat sasaran, yaitu Padi dan Jagung. Dalam mendukung tugas dan fungsi BPSIP Kalimantan Barat mendiseminasikan Standar Instrumen Pertanian, serta meningkatkan pengetahuan dan kapasitas peserta, dua materi yang akan dipaparkan dalam Standar Produksi Benih Jagung Bersari Bebas (SNI 6232:2015) dan Standar Perbenihan Padi (SNI 6233:2015). Selain itu, untuk menunjang keterampilan

petani dilakukan praktek penggunaan Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK). PUTK adalah suatu alat untuk menganalisis kadar hara tanah lahan kering yang dapat digunakan di lapangan dengan cepat, mudah, murah, dan cukup akurat. PUTK dirancang untuk mengukur kadar hara P, K, C-organik, pH, dan kebutuhan kapur, kecuali hara N. Diantara perangkat uji lainnya, pemilihan PUTK dilakukan menyesuaikan karakteristik lahan di lokasi bimtek.

Pelaksanaan bimtek dilakukan di 4 (empat) lokasi, antara lain Kabupaten Landak sebanyak 200 peserta, Kabupaten Melawi sebanyak 100 peserta, Kabupaten Sintang sebanyak 100 peserta, dan Kota Pontianak sebanyak 200 peserta. Berdasarkan evaluasi peserta pelaksanaan Bimtek Perbenihan Standar di Kalimantan Barat, diperoleh informasi bahwa peserta Bimtek berumur antara 19 – 61 tahun, dimana 71 % merupakan petani milenial dengan umur 19 – 40 tahun, dan 29 % merupakan petani dengan usia 41 – 61 tahun. Dari sisi pendidikan, peserta Bimtek memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut : SD = 3 %, SMP = 21 %, SMA/SMK = 58 %, D3 = 3 %, dan S1 = 15 %, jadi Sebagian besar tingkat pendidikan peserta bimtek adalah SMA/SMK. Untuk mengetahui peningkatan kapasitas peserta Bimtek maka dilakukan pre test dan post test, hasil pre test dan post test selanjutnya dianalisis dengan uji tingkat bertanda Wilcoxon dengan menggunakan SPSS Ver 16. Diketahui bahwa nilai normal Z terstandarisasi adalah -4.788, sedangkan nilai probabilitas kumulatif dari Z ((Asymp. Sig. (2-tailed)) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa "Bimtek Perbenihan Standar di Kalimantan Barat berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan dari peserta.



Gambar 40. Pelaksanaan bimbingan teknis di (1) Kabupaten Melawi, (2) Kabupaten Sintang, (3) Kabupaten Sanggau, (4) Kota Pontianak

3. Perbenihan Tanaman Perkebunan Terstandar

Tanaman perkebunan merupakan komoditas yang sangat penting bagi sumber pendapatan devisa negara dan sebagai mata pencaharian masyarakat. Kelapa memiliki banyak manfaat diantaranya mulai dari daging buah, air kelapa, minyak kelapa, hingga serat dan sabut yang dihasilkan dari batok kelapanya. Dalam beberapa tahun terakhir, minyak kelapa dan produk berbasis kelapa lainnya seperti santan dan tepung kelapa, semakin populer dan banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Tanaman kelapa merupakan tanaman perkebunan yang sangat penting dan sebagai sumber pendapatan sebagian besar petani terutama pada daerah pesisir pantai di Kalimantan Barat. Namun beberapa tahun terakhir ini luasan tanaman kelapa semakin berkurang karena tanaman kelapa sudah banyak yang tua sehingga produktivitasnya menurun, yang menyebabkan pendapatan petani juga berkurang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa di Kalimantan Barat maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Salah satu faktor pendongkrak peningkatan produktivitas tanaman adalah dengan penggunaan benih tanaman berkualitas baik.

Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi, koordinasi, advokasi, intermediasi, fasilitasi, menjalin jejering informasi dan mendatabeskan informasi. Ruang lingkup kegiatan Perbenihan Tanaman Perkebunan terstandar yaitu: 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait, 2) Melakukan persiapan bahan tanam buah kelapa yang sudah dilabel, 3) Melaksanakan perbenihan tanaman perkebunan terstandar, dan 4) Penyebaran atau distribusi benih tanaman kelapa yang sudah bersertifikat berdasarkan calon petani calon lokasi. Prosedur pelaksanaan yang terdiri dari: Persemaian benih kelapa dilakukan dengan persiapan lahan, pengolahan lahan, pembuatan bedengan dan melakukan persemaian. Pembibitan dilakukan dengan cara menggunakan polybag (persiapan media, pengisian polybag, dan penanaman benih kelapa, pemeliharaan terdiri dari peyiraman, pemupukan, penyiangan gulma dan pengendalian hama dan penyakit.

Hasil kegiatan yaitu melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, melakukan survey lokasi Kebun Induk Terpilih yang akan dijadikan sebagai butiran untuk benih kelapa, pelaksanaan panen butiran benih kelapa, melakukan sertifikasi butiran kelapa, pengangkutan butiran buah kelapa dari Kebun Induk Terpilih dilokasi persemaian, melakukan kegiatan persemaian pada tempat yang sudah disiapkan, melakukan pengisian polybag dengan pencampuran tanah, pupuk kandang ayam, sekam perbandingan 5:1:1, kemudian dilakukan pemindahan benih dari persemaian pada polybag yang sudah diisi tanah 1/3 bagian pada bagian dasar. Masukkan benih pada polybag pada posisi tegak, kemudian diisi tanah. Pemeliharaan tanaman yaitu pemupukan, peyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit. Sertifikasi benih kelapa dengan kriteria tinggi minimal 40 cm, jumlah daun

minimal 3 helai, tidak ada serangan hama dan penyakit serta tumbuh dengan baik. Berdasarkan hasil sertifikasi yang dilakukan oleh pengawas benih tanaman perkebunan jumlah benih yang disertifikasi sebanyak 4.503 tanaman. Kemudian melakukan pemasangan label dan melakukan distribusi.



Gambar 41. Perbenihan dan pembibitan di lapangan



Gambar 42. Sertifikasi benih dan pemasangan label

Sasaran Kegiatan (SK) 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	82	83,01	101,23

Nilai pembangunan Zona Integritas BPSIP Kalimantan Barat melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai. Nilai ini diperoleh dari penilaian atas komponen Pengungkit yang terdiri dari unsur Pemenuhan (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), dan unsur Reform. Selain itu, dilakukan penilaian atas komponen Hasil yang terdiri dari unsur Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel (Nilai survey persepsi korupsi berdasarkan survey eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi /IPAK dan Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya) dan unsur Pelayanan Publik Yang Prima (Nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survey eksternal). Kerapihan dokumentasi dan arsip menjadi faktor penting dalam penilaian nilai pembangunan Zona Integritas.

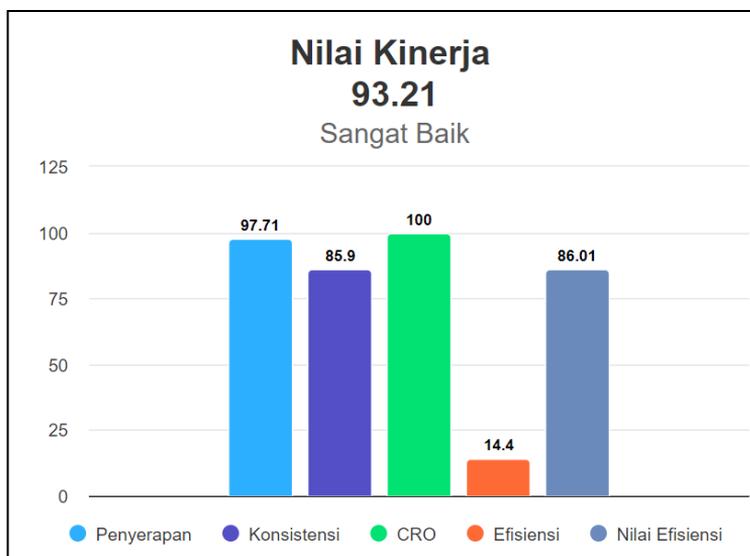
Sasaran Kegiatan (SK) 4: Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator	Indikator Kinerja Utama Target		
			Target	Capaian	%
1	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai kinerja anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	91	93,21	102,43

Nilai kinerja anggaran BPSIP Kalbar didapatkan dari 5 poin penilaian antara lain penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi dan nilai efisiensi dari realisasi anggaran maupun kemajuan pelaksanaan masing-masing komponen kegiatan pada setiap bulannya. Gambar 2 menunjukkan nilai kinerja anggaran BPSIP Kalbar pada tahun 2023. Realisasi nilai kinerja BPSIP Kalbar melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Balai 2023.



Gambar 43. Grafik Capaian Nilai Kinerja Anggaran

Sasaran Kegiatan (SK): Terlaksananya Layanan BMN

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan BMN.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan BMN

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "adanya layanan BMN". Adanya layanan BMN pada tahun 2023 dari target 1 layanan berhasil diperoleh 1 layanan atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,05% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui realisasi pengelolaan IP2TP Sei Kakap, Selakau, dan Simpang Monterado.

Sasaran Kegiatan (SK): Terlaksananya Layanan Umum

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan umum.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan umum

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "adanya layanan umum". Adanya layanan umum pada tahun 2023 dari target 1 layanan berhasil diperoleh 1 layanan atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 2,07% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui realisasi Layanan Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Laboratorium, dan Peningkatan Mutu Manajemen Satker dan Layanan PPID.

Sasaran Kegiatan (SK): Terlaksananya Layanan Perkantoran

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan perkantoran.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan perkantoran

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "adanya layanan perkantoran". Adanya layanan perkantoran pada tahun 2023 dari target 1 layanan berhasil diperoleh 1 layanan atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Pada Tahun 2023 terdapat 2 (dua) bagian anggaran pada Layanan Perkantoran yaitu Layanan Perkantoran lingkup Badan Litbang Pertanian dan Layanan Perkantoran lingkup BSIP. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,12% (lingkup Balitbangtan) dan 0,31% (lingkup BSIP) dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui realisasi gaji dan tunjangan pegawai dan biaya operasional dan pemeliharaan kantor.

Sasaran Kegiatan (SK): Terlaksananya Layanan Manajemen SDM

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan sarana manajemen SDM.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan Manajemen SDM

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "adanya layanan manajemen SDM". Adanya layanan manajemen SDM pada tahun 2023 dari target 1 unit berhasil diperoleh 1 unit atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 1,77% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui Layanan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan perencanaan dan penganggaran.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan perencanaan dan penganggaran

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "adanya layanan perencanaan dan penganggaran". Adanya layanan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 dari target 1 dokumen berhasil diperoleh 1 dokumen atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 4,60% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dan sinkronisasi kegiatan manajemen.

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan pemantauan dan evaluasi.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan pemantauan dan evaluasi

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "adanya layanan pemantauan dan evaluasi". Adanya layanan pemantauan dan evaluasi pada tahun 2023 dari target 1 dokumen berhasil diperoleh 1 dokumen atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 4,36% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (Monev) dan sistem pengendalian internal (SPI).

Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu adanya layanan manajemen keuangan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Adanya layanan manajemen keuangan

Pencapaian target indikator kinerja sasaran "adanya layanan manajemen keuangan". Adanya layanan manajemen keuangan pada tahun 2023 dari target 1 dokumen berhasil diperoleh 1 dokumen atau sebesar 100% dan termasuk kedalam kategori **sangat berhasil**. Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,17% dari pagu anggaran yang direncanakan. Kegiatan ini dilakukan melalui pengelolaan keuangan (UAPPA/B-W dan SAKPA/SIMAK-BMN).

3.4 Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Keuangan BPSIP Kalimantan Barat

BPSIP Kalimantan Barat pada tahun 2023 mengalami 12 kali revisi anggaran. Berdasarkan hasil revisi terakhir, pagu anggaran BPSIP Kalimantan Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp. 10.678.760.000,-. Alokasi anggaran per jenis belanja terlihat pada Gambar 18 dibawah ini.

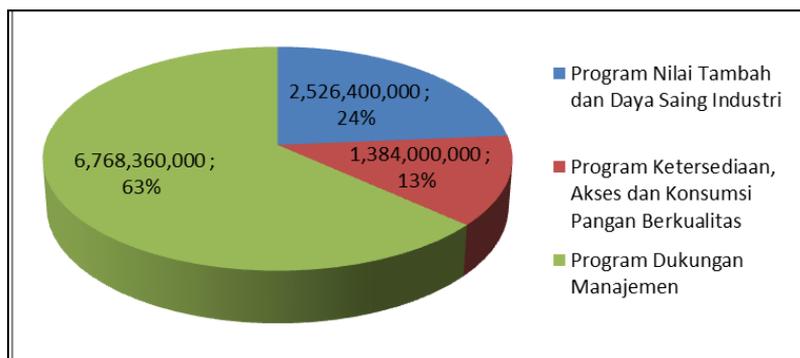


Gambar 44. Pagu Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Komposisi pagu anggaran BPSIP Kalbar terdiri atas 3 bagian besar kegiatan yaitu :

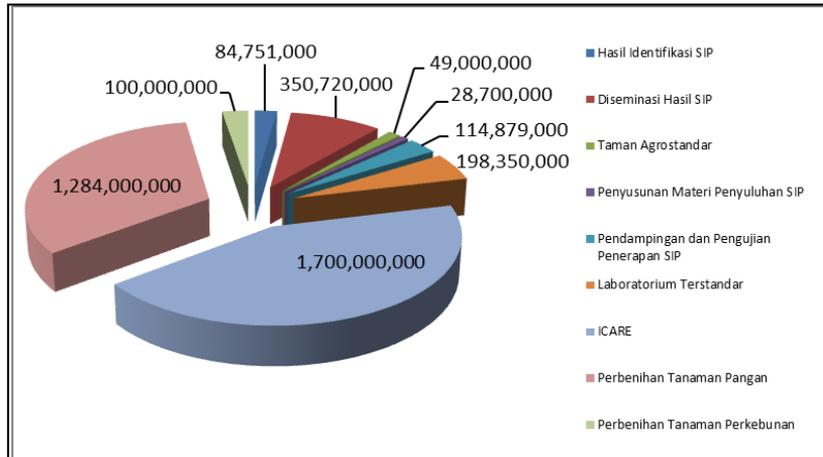
1. Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
2. Kegiatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
3. Kegiatan Dukungan Manajemen.

Adapun proporsi kegiatan diatas terlihat pada gambar dibawah ini.

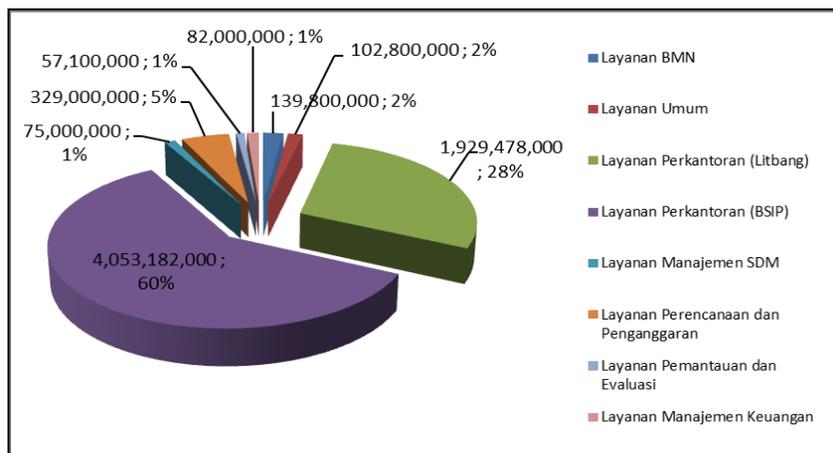


Gambar 45. Komposisi Pagu Anggaran BPSIP Kalbar 2023

Dari gambar diatas terlihat bahwa 63% dari total pagu anggaran BPSIP Kalbar dialokasikan pada kegiatan dukungan manajemen, dengan alokasi tertinggi pada output gaji dan belanja pegawai (Detail pada gambar 21). Adapun kegiatan program nilai tambah dan daya saing mendapatkan alokasi anggaran 24%, dan kegiatan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas mendapatkan alokasi anggaran sebesar 13% (Detail pada gambar 20).



Gambar 46. Alokasi Anggaran Pada Rincian Output Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas



Gambar 47. Alokasi Anggaran Rincian Output Dukungan Manajemen 2023

Secara keseluruhan realisasi anggaran berdasarkan SPM sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.436.151.896 atau sekitar 97,73% sedangkan, berdasarkan SP2D realisasi anggaran sebesar Rp. 10.434.585.679 atau sekitar 97,71% dari total anggaran, dimana terdapat anggaran yang tidak terealisasi karena blokir anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat).

Pada tahun 2023, kinerja keuangan BPSIP Kalimantan Barat juga tergolong **sangat baik** yaitu 97,71% dengan rincian realisasi keuangan per jenis belanja terlihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 15. Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja 2023

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
Belanja Pegawai	3,846,660,000	3,837,882,644	8,777,356	99.77
Belanja Barang	6,633,750,000	6,398,353,035	235,396,965	96.45
Belanja Modal	198,350,000	198,350,000	-	100
JUMLAH	10,678,760,000	10,434,585,679	244,174,321	97.71

Adapun rincian realisasi keuangan pada masing-masing rincian output terlihat pada tabel 12 dibawah ini.

Tabel 16. Tabel Realisasi Keuangan Pada Rincian Output 2023 (berdasarkan Realisasi SPM)

Kode /Output	Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
				Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		2.326.400.00	2.320.894.827	2.146.208.299	99,76%	5.505.173
EC.6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	52 Produk	2.326.400.00	2.320.894.827	2.146.208.299	99,76%	5.505.173
ADA	Standardisasi Produk	4 Produk	84.751.000	83.980.352	83.980.352	99,09%	770.648
ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang Dibutuhkan		84.751.000	83.980.352	83.980.352	99,09%	770.648
052	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura		84.751.000	83.980.352	83.980.352	99,09%	770.648
052	0A Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Komoditas Jeruk		84.751.000	83.980.352	83.980.352	99,09%	770.648
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		228.420.000	228.300.754	214.737.014	99,95%	119.246
AEF	109 Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasi		228.420.000	228.300.754	214.737.014	99,95%	119.246
051	Diseminasi standar instrumen pertanian		199.720.000	199.600.754	186.737.014	99,94%	119.246
051	0A Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian		150.720.000	150.626.004	27.200.000	99,94%	93.996
051	0B Taman Agrostandar	20 Produk	49.000.00	48.974.750	48.974.750	99,95%	25.250
051	0C Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat	9	0	0	0	00,00%	0
053	Penyusunan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi	11	28.700.000	28.700.000	28.000.000	100%	0

Kode /Output		Unit Kerja / Kegiatan	Volume		Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
						Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
053	0A	Menyusun Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian	3	Teknologi	28.700.000	28.700.000	28.000.000	100%	0
BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			114.879.000	114.351.397	112.981.397	99,54%	527.603
BDB.101		Lembaga Penerap Standar yang didampingi			114.879.000	114.351.397	112.981.397	99,54%	527.603
051		Demplot Pengembangan VUB Padi Khusus dan VUB Padi Spesifik Lokasi di KalBar			114.879.000	114.351.397	112.981.397	99,54%	527.603
051	0A	Pengembangan Benih/Bibit Sumber Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hasil Inovasi Balitbangtan diKalimantan Barat			114.879.000	114.351.397	112.981.397	99,54%	527.603
CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			198.350.000	198.350.000	198.350.000	100%	0
CAG.109		Sarana Laboratorium Standardisasi			198.350.000	198.350.000	198.350.000	100%	0
051		Laboratorium Terstandar	1	layanan	198.350.000	198.350.000	198.350.000	100%	0
051	A	Laboratorium Terstandar			198.350.000	198.350.000	198.350.000	100%	0
QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1.700.000.000	1.695.912.324	1.536.159.536	99,76%	4.087.676
QDB	101	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment			1.700.000.000	1.695.912.324	1.536.159.536	99,76%	4.087.676
051		Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas			1.700.000.000	1.695.912.324	1.536.159.536	99,76%	4.087.676

Kode /Output	Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan					
				Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana		
		pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)							
051	0A	Pengembangan MOdel Kawasan Jeruk-Padi Berbasis Inovasi dan Korporasi Pertanian di Kalimantan Barat			1.700.000.000	1.695.912.324	1.536.159.536	99,76%	4.087.676
HA		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			1.384.000.000	1.383.338.707	1.342.140.857	99,95%	661.293
HA.6915		Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar			1.384.000.000	1.383.338.707	1.342.140.857	99,95%	661.293
CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			1.384.000.000	1.383.338.707	1.342.140.857	99,95%	661.293
CAG	101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar			1.284.000.000	1.283.374.207	1.252.152.357	99,95%	625.793
051		Benih Tanmaan Pangan			1.284.000.000	1.283.374.207	1.252.152.357	99,95%	625.793
051	0A	Perbenihan Tanaman Pangan Terstandar (6,5 ton)			95.700.000	95.313.850	68.492.000	99,60%	386.150
051	0B	Bimbingan Teknis Perbenihan Standar	1	layanan	1.188.300.000	1.188.060.357	1.183.660.357	99,98%	239.643
CAG	102	Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar			100.000.000	99.964.500	89.988.500	99,96%	35.500
051		Benih Perkebunan			100.000.000	99.964.500	89.988.500	99,96%	35.500
051	0A	Perbenihan Tanaman Perkebunan Terstandar (4500 pohon)			100.000.000	99.964.500	89.988.500	99,96%	35.500

Kode /Output	Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
				Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
WA	Program Dukungan Manajemen		6.768.360.000	6.731.918.362	6.286.971.668	99,46%	36.441.638
WA.1809	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian		1.929.478.000	1.927.074.945	1.927.074.945	99,88%	2.403.055
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.929.478.000	1.927.074.945	1.927.074.945	99,88%	2.403.055
EBA.994	Layanan Perkantoran		1.929.478.000	1.927.074.945	1.927.074.945	99,88%	2.403.055
001	Gaji dan Tunjangan		1.314.943.000	1.314.937.726	1.314.937.726	99,99%	5.274
001	0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan		1.314.943.000	1.314.937.726	1.314.937.726	99,99%	5.274
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		614.535.000	612.137.219	612.137.219	99,61%	2.397.781
002.0A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran		237.680.000	237.321.220	237.321.220	99,85%	358.780
002.0B	Langganan Daya dan Jasa		60.900.000	60.253.922	60.253.922	98,94%	646.078
002.0C	Pemeliharaan Kantor		180.095.000	179.250.677	179.250.677	99,53%	844.323
002.0D	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		95.000.000	94.451.400	94.451.400	99,42%	548.600
002.0E	Pembayaran Terkait Pelaksana Operasional Kantor		24.540.000	24.540.000	24.540.000	100%	0
002.0G	Pembayaran UHL		16.320.000	16.320.000	16.320.000	100 %	0
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian		4.838.882.000	4.804.843.417	4.359.896.723	99,30%	34.038.583
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4.295.782.000	4.280.824.589	3.935.630.020	99,65 %	14.957.411
EBA.956	Layanan BMN		139.800.000	139.725.000	58.205.000	99,95 %	75.000
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN		139.800.000	139.725.000	58.205.000	99,95 %	75.000

Kode /Output	Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
				Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
051.0A	Pemberdayaan IP2TP Sei Kakap, Selakau, dan Simpang Monterado		139.800.000	139.725.000	58.205.000	99,95 %	75.000
EBA.962	Layanan Umum		102.800.000	100.675.068	46.991.335	97,93%	2.124.932
051	Layanan Kerumahtangaan dan Umum		102.800.000	100.675.068	46.991.335	97,93%	2.124.932
051.0A	Layanan Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Laboratorium, dan Peningkatan Mutu Manajemen Satker		89.450.000	87.375.233	36.291.500	97,68	2.074.767
051.0B	Layanan PPID		13.350.000	13.299.835	10.699.835	99,62%	50.165
EBA.994	Layanan Perkantoran		4.053.182.000	4.040.424.521	3.830.433.685	99,69%	12.757.479
001	Gaji dan Tunjangan		2.531.717.000	2.524.511.135	2.467.782.135	99,72%	7.205.865
001.0A	Pembayaran gaji dan tunjangan PNS		2.498.633.000	2.492.634.068	2.437.489.068	99,76%	5.998.932
001.0B	Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK		33.084.000	31.877.067	30.293.067	96,35%	1.206.933
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.521.465.000	1.515.913.386	1.362.651.550	99,64%	5.551.61
002.0A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran		601.193.000	599.194.764	540.102.442	99,67%	1.998.236
002.0B	Langganan Daya dan Jasa		194.220.000	191.910.662	166.065.948	98,81%	2.309.338
002.0C	Pemeliharaan Kantor		306.012.000	305.367.460	273.387.660	99,79%	644.540
002.0D	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		235.100.000	234.500.500	229.275.500	99,75%	599.500
002.0E	Pembayaran Terkait Pelaksana Operasional Kantor		79.200.000	79.200.000	61.600.000	100,0%	0
002.0F	Pengadaan Baju Dinas		51.100.000	51.100.000	51.100.000	100,0%	0
002.0G	Pembayaran UHL		54.640.000	54.640.000	41.120.000	100,0%	0

Kode /Output	Unit Kerja / Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja Keuangan			
				Realisasi Kumulatif	Realisasi Bulanan	%	Sisa Dana
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		75.000.000	73.674.999	62.554.487	98.23%	1.325.001
EBC.954	Layanan Manajemen SDM		75.000.000	73.674.999	62.554.487	98.23%	1.325.001
051	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian		75.000.000	73.674.999	62.554.487	98.23%	1.325.001
051.0A	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia		75.000.000	73.674.999	62.554.487	98.23%	1.325.001
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		468.100.000	450.343.829	361.712.216	96.21%	17.756.171
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		329.000.000	313.870.610	253.315.108	95.40%	15.129.390
051	Penyusunan Rencana Program Anggaran		329.000.000	313.870.610	253.315.108	95.40%	15.129.390
051.0A	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran		54.000.000	43.625.791	16.947.700	80,79%	10.374.209
051.0B	Sinkronisasi Kegiatan Manajemen		275.000.000	270.244.819	236.367.408	98,27%	4.755.181
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		57.100.000	54.609.861	36.527.250	95,64%	2.490.139
051	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		57.100.000	54.609.861	36.527.250	95,64%	2.490.139
051.0A	Monitoring dan Evaluasi (Monev)		47.000.000	45.152.611	34.427.250	96,07%	1.847.389
051.0B	Sistem Pengendalian Internal (SPI)		10.100.000	9.457.250	2.100.000	93,64%	642.750
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		82.000.000	81.863.358	71.869.858	99,83%	136.642
051	Pengelolaan Keuangan		82.000.000	81.863.358	71.869.858	99,83%	136.642
051.0A	UAPPA/B-W dan SAKPA/SIMAK-BMN		82.000.000	81.863.358	71.869.858	99,83%	136.642

2. Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP BPSIP Kalimantan Barat Tahun 2023 berasal dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan negara telah disetor ke kas negara 2023 adalah sebesar Rp.47.544.008; dengan rincian jumlah penerimaan umum sebesar Rp.19.162.008; dan penerimaan fungsional sebesar Rp.28.382.000. Rincian PNBP pada Tahun 2023 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 17. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023

No	URAIAN	M A P	TARGET	P E N E R I M A A N			PENYETORAN PADA KAS NEGARA		
			TAHUN 2023	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
I	PENERIMAAN UMUM		Rp						
1	Pendapatan Sewa Tanah,Gedung dan Bangunan	425131	3.672.000	3.540.174	321.834	3.862.008	3.540.174	321.834	3.862.008
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	425129	-	-	-	-	-	-	-
4	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Hasil lelang)	425119	-	13.925.000	1.375.000	15.300.000	13.925.000	1.375.000	15.300.000
	Jumlah Penerimaan Umum		3.672.000	17.465.174	1.696.834	19.162.008	17.465.174	1.696.834	19.162.008
II	PENERIMAAN FUNGSIONAL		Rp						
1	Perolehan Dari Hasil Pertanian Untuk Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	425112	79.328.000	24.356.000	-	24.356.000	24.356.000	-	24.356.000
2	Perolehan Dari Hasil Pertanian untuk Hasil Penelitian / Riset dan Hasil Pengembangan IPTEK	425434	-	-	-	-	-	-	-
3	Jasa Layanan Pengujian dan	425289	42.000.000	3.984.000	42.000	4.026.000	3.984.000	42.000	4.026.000

No	U R A I A N	M A P	TARGET	P E N E R I M A A N			P E N Y E T O R A N P A D A K A S N E G A R A		
			TAHUN 2023	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
	Analisis Serta Sertifikasi (Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya)								
	Jumlah Penerimaan Fungsional		121.328.000	28.340.000	42.000	28.382.000	28.340.000	42.000	28.382.000
	Jumlah I + II		125.000.000	45.805.174	1.738.834	47.544.008	45.805.174	1.738.834	47.544.008

III. PENUTUP

Ditinjau dari sudut keberhasilan kinerja BPSIP Kalimantan Barat, sudah banyak diseminasi standardisasi instrumen pertanian yang dilakukan ditahun pertama sejak bertransformasi menjadi BPSIP Kalimantan Barat melalui berbagai kegiatan seperti yang telah diuraikan di atas. Kegiatan telah dirancang dengan baik dan dilakukan monitoring dan evaluasi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi BPSIP Kalimantan Barat antara lain adalah sumber daya manusia, dimana tenaga fungsional seperti Analis Standardisasi mendukung Tugas dan Fungsi Balai masih belum tersedia dan fungsional khusus lainnya masih kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, BPSIP Kalimantan Barat menyampaikan usulan kebutuhan pegawai dan mengikutsertakan sebagian fungsional lainnya untuk ikut pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional. Diharapkan hal tersebut dapat memotivasi SDM yang ada untuk segera mengajukan jabatan fungsional.

Selain SDM, pemberdayaan laboratorium dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan diseminasi standardisasi instrumen pertanian. Peralatan laboratorium di BPSIP Kalimantan Barat kondisinya masih cukup baik dan sudah dimanfaatkan dengan baik serta sangat membantu di dalam memberikan informasi data hasil penelitian dan pengkajian. Namun demikian masih ada beberapa alat yang perlu dilengkapi di dalam laboratorium tersebut terutama laboratorium tanah. Selain laboratorium tanah, juga segera akan dioperasionalkan laboratorium benih untuk mendukung UPBS *High Profile*. Oleh karena itu diharapkan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian perlu memikirkan untuk pengadaan peralatan laboratorium guna menunjang kegiatan penelitian dan pengkajian. Hal yang tidak kalah terpenting adalah dukungan tenaga laboran. Tiga IP2SIP yang dimiliki BPSIP Kalimantan Barat sudah dimanfaatkan untuk pelaksanaan produksi benih sumber dan *show window*.

Dalam upaya memperbaiki Kinerja BPSIP Kalimantan Barat perlu disampaikan saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BPSIP Kalimantan Barat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ada pembinaan secara sistematis terhadap SDM untuk lebih meningkatkan kompetensi baik melalaui jalur formal maupun informal.
- b. Perlu dilakukan revitalisasi peran laboratorium, IP2SIP dan perpustakaan dalam mendukung kegiatan litkaji dan diseminasi.
- c. Mempererat jaringan diseminasi dengan Pusat dan Balai Pengujian Standar Komoditas.
- d. Mempererat jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, *stakeholder* dan pelaku usaha.

- e. Mengkoordinasikan kebutuhan SDM baru terutama dari bidang keahlian hama dan penyakit, pengolahan hasil pertanian, mekanisasi pertanian, dan tenaga laboran.

LAMPIRAN

FORM 1 :
REALISASI TARGET DAN KINERJA TAHUN 2023
BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN

Periode Penyusunan LAKIN: BPSIP Kalbar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis IKK	Capaian Kinerja		Keluaran (Output)		Volume keluaran		Anggaran		Capaian kinerja	Capaian volume keluaran	Capaian anggaran
				Target IKK	Realisasi IKK	Item keluaran	Satuan keluaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)			
1	Tersedianya hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan	Jumlah hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan	Maximize	1	1	Jumlah hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan	Standar	1	1	84,751,000	83,980,352	100.00%	100.00%	99.09%
2	Tersedianya lembaga penerap standar yang didampingi	Jumlah lembaga penerap standar yang didampingi <i>*Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat</i>	Maximize	1	1	Jumlah lembaga penerap standar yang didampingi	Lembaga	1	1	741,649,000	541,002,151	100.00%	100.00%	72.95%
3	Tersedianya model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Jumlah model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Maximize	1	1	Jumlah model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Lembaga	1	1	1,700,000,000	1,695,912,324	100.00%	100.00%	99.76%
4	Tersedianya produk instrumen tanaman pangan terstandar	Jumlah produk instrumen tanaman pangan terstandar	Maximize	4506.5	4509.88	Jumlah produk instrumen tanaman pangan terstandar	Unit	4506.5	4509.88	1,384,000,000	1,383,338,707	100.08%	100.08%	99.95%
5	Terlaksananya layanan BMN	Adanya layanan BMN	Maximize	1	1	Adanya layanan BMN	Layanan	1	1	139,800,000	139,725,000	100.00%	100.00%	99.95%
6	Terlaksananya layanan umum	Adanya layanan umum	Maximize	1	1	Adanya layanan umum	Layanan	1	1	102,800,000	100,675,068	100.00%	100.00%	97.93%
7	Terlaksananya layanan perkantoran (Litbang)	Adanya layanan perkantoran (Litbang)	Maximize	1	1	Adanya layanan perkantoran (Litbang)	Layanan	1	1	1,929,478,000	1,927,074,945	100.00%	100.00%	99.88%
8	Terlaksananya layanan perkantoran (BSIP)	Adanya layanan perkantoran (BSIP)	Maximize	1	1	Adanya layanan perkantoran (BSIP)	Layanan	1	1	4,053,182,000	4,040,424,521	100.00%	100.00%	99.69%
9	Terlaksananya layanan manajemen SDM	Adanya layanan manajemen SDM	Maximize	1	1	Adanya layanan manajemen SDM	Unit	7	7	75,000,000	73,674,999	100.00%	100.00%	98.23%
10	Terlaksananya layanan perencanaan dan penganggaran	Adanya layanan perencanaan dan penganggaran	Maximize	1	1	Adanya layanan perencanaan dan penganggaran	Dokumen	1	1	329,000,000	313,870,610	100.00%	100.00%	95.40%
11	Terlaksananya layanan pemantauan dan evaluasi	Adanya layanan pemantauan dan evaluasi	Maximize	1	1	Adanya layanan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	1	1	57,100,000	54,609,861	100.00%	100.00%	95.64%
12	Terlaksananya layanan manajemen keuangan	Adanya layanan manajemen keuangan	Maximize	1	1	Adanya layanan manajemen keuangan	Dokumen	1	1	82,000,000	81,863,358	100.00%	100.00%	99.83%

Ket:

*DIPA BLOKIR

Lampiran 2

FORM 2 :
REALISASI TARGET DAN KINERJA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN

Periode Penyusunan LAKIN: 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Jenis IKK	Capaian Kinerja 2023			Capaian Kinerja 2024			Capaian Kinerja 2025			Capaian Kinerja 2026			Capaian Kinerja 2027		
				Target IKK	Realisasi IKK	Capaian IKK	Target IKK	Realisasi IKK	Capaian IKK	Target IKK	Realisasi IKK	Capaian IKK	Target IKK	Realisasi IKK	Capaian IKK	Target IKK	Realisasi IKK	Capaian IKK
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Jumlah Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Maximize	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian	Maximize	185	185	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Terlaksananya kegiatan Taman Agrostandar	Maximize	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		*Terlaksananya Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat	Maximize	1	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Terlaksananya Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	Maximize	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Lembaga Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Maximize	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Laboratorium Terstandar	Terlaksananya kegiatan Laboratorium Terstandar	Maximize	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare)	Jumlah model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Maximize	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Tersedianya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Terstandar	Maximize	6.5	6.88	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Terstandar		4.500	4.503	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Terlaksananya layanan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Jumlah layanan dukungan manajemen internal	Maximize	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Ket:

*DIPA BLOKIR

Lampiran 3						
FORM 3 :						
PENCAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RENSTRA 2022 - 2024						
BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023						
UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN						
Periode Penyusunan LAKIN: 2023						
No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Sasaran Kegiatan	Jenis IKK	Capaian Kinerja 2021		
				Target IKK	Realisasi IKK	Capaian IKK
1	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna	Maximize	1	1	100%
2	a Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian	Terlaksananya Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Maximize	1	1	100%
	b Terlaksananya kegiatan Taman Agrostandar		Maximize	185	185	100%
	c *Terlaksananya Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat		Maximize	1	0	0%
	d Terlaksananya Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi		Maximize	1	1	100%
3	Jumlah Lembaga Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Maximize	1	1	100%
4	Terlaksananya kegiatan Laboratorium Terstandar	Laboratorium Terstandar	Maximize	1	1	100%
5	Jumlah model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (iCare)	Maximize	1	1	100%
6	Tersedianya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar					
	a Produksi tanaman pangan terstandar	Jumlah benih padi	Maximize	6.5	6.88	105.85%
	b Produksi tanaman perkebunan terstandar	Jumlah benih kelapa		4500	4503	100.07%
7	a Pengelolaan IP2TP Sei Kakap, Selakau, dan Simpang Monterado	Adanya layanan BMN	Maximize	1	1	100.00%
8	b Layanan Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Laboratorium, dan Peningkatan Mutu Manajemen Satker	Adanya layanan umum	Maximize	1	1	100.00%
	b Layanan PPID					
5	a Gaji dan Tunjangan	Adanya layanan perkantoran	Maximize	1	1	100.00%
	b Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
6	Layanan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia	Adanya layanan Manajemen SDM	Maximize	1	1	100.00%
7	a Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Adanya layanan perencanaan dan penganggaran	Maximize	1	1	100%
	b Sinkronisasi Kegiatan Manajemen					
8	a Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Sistem Pengendalian	Adanya layanan pemantauan dan evaluasi	Maximize	1	1	100%
	b Sistem Pengendalian Internal (SPI)					
9	a UAPPA/B-W dan SAKPA/SIMAK-BMN	Adanya layanan manajemen keuangan	Maximize	1	1	100%
	Ket:					
	*DIPA BLOKIR					

FORM 4 :
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA
BERDASARKAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PERTANIAN

Periode Penyusunan LAKIN: 2023
Jumlah Keluaran: 12

No	Keluaran (output)		Volume keluaran		Anggaran		RAK/RVK	PAK/TVK	Efisiensi
	Item Keluaran	Satuan keluaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)			
1	Tersedianya hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan	Jumlah hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan	1	1	84,751,000	83,980,352	83,980,352	84,751,000	0.91%
2	Tersedianya lembaga penerap standar yang didampingi	Jumlah lembaga penerap standar yang didampingi <i>*Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat</i>	1	1	741,649,000	541,002,151	541,002,151	741,649,000	27.05%
3	Tersedianya model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	Jumlah model kawasan jeruk-padi berbasis inovasi dan korporasi pertanian yang dihasilkan	1	1	1,700,000,000	1,695,912,324	1,695,912,324	1,700,000,000	0.24%
4	Tersedianya produk instrumen tanaman pangan terstandar	Jumlah produk instrumen tanaman pangan terstandar	4506.5	4509.88	1,384,000,000	1,383,338,707	306,735	307,112	0.12%
5	Terlaksananya layanan BMN	Adanya layanan BMN	1	1	139,800,000	139,725,000	139,725,000	139,800,000	0.05%
6	Terlaksananya layanan umum	Adanya layanan umum	1	1	102,800,000	100,675,068	100,675,068	102,800,000	2.07%
7	Terlaksananya layanan perkantoran (Litbang)	Adanya layanan perkantoran (Litbang)	1	1	1,929,478,000	1,927,074,945	1,927,074,945	1,929,478,000	0.12%
8	Terlaksananya layanan perkantoran (BSIP)	Adanya layanan perkantoran (BSIP)	1	1	4,053,182,000	4,040,424,521	4,040,424,521	4,053,182,000	0.31%
9	Terlaksananya layanan manajemen SDM	Adanya layanan manajemen SDM	1	1	75,000,000	73,674,999	73,674,999	75,000,000	1.77%
10	Terlaksananya layanan perencanaan dan penganggaran	Adanya layanan perencanaan dan penganggaran	1	1	329,000,000	313,870,610	313,870,610	329,000,000	4.60%
11	Terlaksananya layanan pemantauan dan evaluasi	Adanya layanan pemantauan dan evaluasi	1	1	57,100,000	54,609,861	54,609,861	57,100,000	4.36%
12	Terlaksananya layanan manajemen keuangan	Adanya layanan manajemen keuangan	1	1	82,000,000	81,863,358	81,863,358	82,000,000	0.17%
					10,678,760,000	10,436,151,896			

Keterangan:

- Mohon hapus baris yang tidak terisi
- Kolom "item keluaran" berisi seluruh keluaran (output) yang dihasilkan dalam RKA/KL dan ADIK
- Kolom "Satuan keluaran" merupakan satuan dari masing-masing keluaran, misal dokumen, orang, kegiatan, dll
- Kolom "Target Volume Keluaran (TVK)" merupakan volume keluaran yang ditargetkan untuk masing-masing keluaran berdasarkan satuannya
- Kolom "Realisasi Volume Keluaran (RVK)" merupakan realisasi volume keluaran untuk masing-masing keluaran berdasarkan satuannya
- Kolom "Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)" berisi Pagu anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap keluaran
- Kolom "Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)" berisi Realisasi anggaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap keluaran
- *DIPA BLOKIR

STRUKTUR ORGANISASI BPSIP KALIMANTAN BARAT



Lampiran 7

SCREENSHOT APLIKASI ESAKIP 2023

Menu Kinerja KEMANTAN Login sbg 0914320000

Perencanaan Pengukuran Pelaporan Evaluasi KEMENTERIAN PERTANIAN
Senin, 19 Februari 2024

Dashboard Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah IKU	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Cascading
1	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (0914320000)	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.94%	1
2	Subbagian Tata Usaha Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (0914320100)	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0

Penjelasan Warna

NO	WARNA	KETERANGAN
1	●	Baik (Skor >= 90)
2	●	Hati-hati (70 <= Skor < 90)
3	●	Buruk (Skor < 70)
4	●	Belum Ada Skor
4	○	Belum Input Data

© Kementerian Pertanian RI - 2019.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**

Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak 78241

Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883

Website: www.kalbar.bsip.pertanian.go.id E-mail: bsip.kalbar@pertanian.go.id, bsipkalbar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anjar Suprpto
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Anjar Suprpto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	4506.5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	91

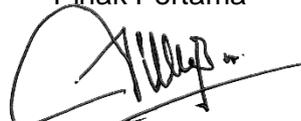
No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	2,526,400,000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	2,526,400,000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	1,384,000,000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	1,384,000,000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	6,768,360,000
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	1,929,478,000
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	4,838,882,000

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Anjar Suprpto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2023

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	6,5
		Produksi Benih Kelapa	Pohon	4.500
TOTAL			UNIT	4.506,5



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT

Jl. Budi Utomo No. 45 Siantan Hulu Pontianak 78241

Telp. (0561) 882069 Fax. (0561) 883883

Website: www.kalbar.bsip.pertanian.go.id E-mail: bsip.kalbar@pertanian.go.id, bsipkalbar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anjar Suprpto
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

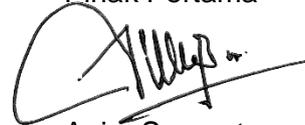
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama


Anjar Suprpto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	4506.5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat (Nilai)	91

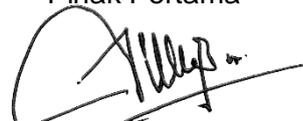
No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	2,526,400,000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	2,526,400,000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	1,384,000,000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	1,384,000,000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	6,768,360,000
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	1,929,478,000
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	4,838,882,000

Pontianak, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Anjar Suprpto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2023

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	6,5
		Produksi Benih Kelapa	Pohon	4.500
TOTAL			UNIT	4.506,5